

- BANKS AND BANKING
- INDONESIA - ECONOMIC CONDITIONS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

B

**KEBIJAKAN DAN AKTIVITAS PERBANKAN
INDONESIA DI JAWA TIMUR
PADA MASA KRISIS EKONOMI 1982-1984**

SKRIPSI

FS. Sej 07/07

Toa
k



OLEH :

AKHMAD PRASETYO IBNU TOAT

NIM : 120110274

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**KEBIJAKAN DAN AKTIVITAS PERBANKAN
INDONESIA DI JAWA TIMUR
PADA MASA KRISIS EKONOMI 1982-1984**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sastra Universitas Airlangga**



OLEH :

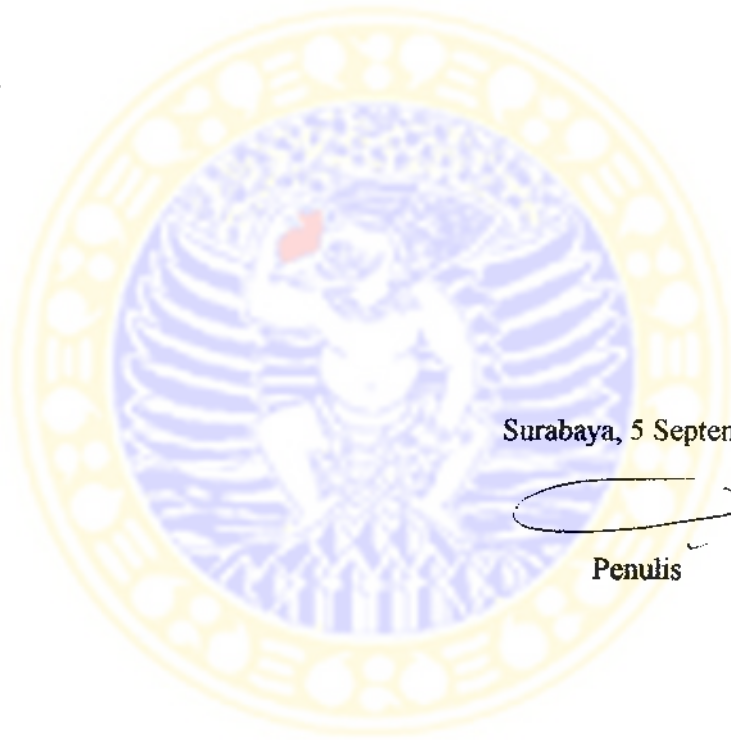
AKHMAD PRASETYO IBNU TOAT

NIM : 120110274

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Surabaya, 5 September 2006

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the word 'Penulis'.

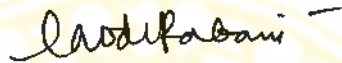
Penulis

HALAMAN PENGESAHAN

Setuju untuk diujikan

Surabaya, 5 September 2006

Dosen Pembimbing



La Ode Rabani, S.S.,M.Hum.

NIP. 132 314 208



JURUSAN ILMU SEJARAH

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2006

skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 5 September 2006

Panitia Penguji terdiri dari :

Ketua



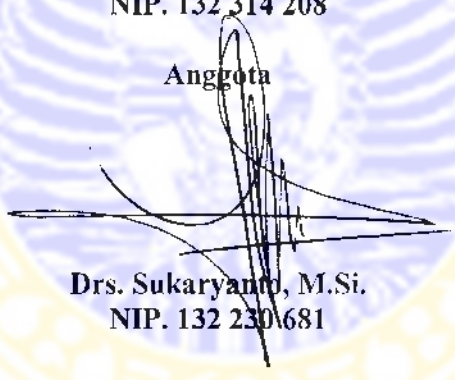
**Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.
NIP. 132 230 679**

Sekretaris




**La Ode Rabani, S.S., M.Hum.
NIP. 132 314 208**

Anggota



**Drs. Sukaryanto, M.Si.
NIP. 132 230 681**

Anggota



**Moardjati, S.S., M.Hum.
NIP. 132 311 472**

HALAMAN MOTTO

**BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI, TAKUT MATI JANGAN HIDUP,
TAKUT HIDUP....MATI SAJA...**
(K.H. Imam Zarkasyi)





**Skripsi ini kupersembahkan kepada
Bapak dan Ibu.....ananda minta maaf
atas keterlambatan ini.....**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini membutuhkan tekad, kemauan dan daya juang yang tinggi. Berbagai kendala, persoalan dan hambatan baik yang datang dari luar dan dari dalam penulis (alhamdulillah) dapat penulis atasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan, dan nasihat sehingga berperan besar dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada kedua orang tuaku yang selalu mengingatkan dan memberikan nasihat serta dorongan saat penulis belum juga lulus. Ananda minta maaf dan terima kasih kepada bapak dan ibu atas keridhoan dan restunya hingga ananda dapat menyelesaikan kuliah. Kepada kakak dan adikku Mas Wawan dan Adit, terima kasih atas segala dukungannya.
2. Bapak Drs. Heru Supriyadi, selaku Dekan Fakultas Sastra, beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan. Terima kasih atas bimbingan dan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak La Ode Rabani, S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan segala arahan yang diberikan ditengah kesibukan aktivitas beliau yang cukup menyita waktu.

4. Bapak Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah. Terima kasih atas perhatian dan usulan skripsi serta motivasi yang diberikan.
5. Bapak Edi Budi S, S.S, selaku dosen wali, Bapak Drs. Sukaryanto, M.Si, Bapak Sarkawi B. Husain, S.S, M.Hum, Bapak Samidi, S.S, Bapak Drs. Muryadi, Ibu Moordiaty, S.S., M.Hum, Ibu Sinta Devi, S.S, Ibu Eni Sugiarti, S.S, selaku dosen Jurusan Ilmu Sejarah. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan pada masa perkuliahan. Bapak Listiono Santoso,S.S., M.Hum, terima kasih atas diskusi dan bimbingan atas penelitian penulis selama masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada para nara sumber, Bapak Jamil di Bank Jatim, Perpustakaan Propinsi Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, Perpustakaan Bank Indonesia, Perpustakaan Medayu Agung dan Toko buku Toga Mas atas kesediaan dan fasilitas yang diberikan selama masa pencarian data.
7. Deka, Anggie dan Alvin, Arif, temen-temen kos yang terus memberikan semangat. Bao, Dewo, Takun, Husein, Uut, Rika, Eva, Nenok, Ikhsan, Aryo, Hendi dan teman-teman di Jurusan Ilmu Sejarah, terima kasih atas dukungan serta motivasinya.
8. Gaguk, Kacong, Soni, Cholies, teman-temanku di K.18c. Noenu, Fitri, Watik, Mahtub, Mas Theo, Bimo, teman-taman di Sativa Organizer. Terus semangat dan jangan menyerah, terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang tidak akan terlupakan.

9. Nita, terima kasih atas dorongan dan motivasinya serta perbincangannya selama ini. Ulan, Pungkas, Jimbon, Sisca, teman-teman diskusiku. Terima kasih atas waktu dan semangat, serta ide-ide kalian.
10. Cindy, Rizka, Hepi, Najicha, Anis, Henry, Emon, Ameng dan adik-adikku yang lain di UK-Mapanza Unair, terima kasih atas segala keceriaan dan semangat kalian. Terima kasih juga atas komputer buat penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Sejarah.

Surabaya, 5 September 2006

Penulis

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kenaikan Dana Perbankan Maret 1981-1982 dan Maret 1982 -1983.....	2
2. Posisi transaksi jual beli devisa Januari s/d September 1982.....	27
3. Perkembangan Pemberian Kredit Perbankan Nasional 1982-1983.....	40
4. Bank-bank Umum Swasta hasil merger 1972-1977.....	42
5. Perkembangan Deposito Berjangka Bank-Bank Pemerintah.....	43
6. Perkembangan Posisi Debitur menurut sektor Ekonomi Maret 1983.....	58
7. Perkembangan Posisi Debitur menurut jangka waktu 1982-1983.....	59
8. Perkembangan Sumber Dana BPD JATIM Maret 1981-1984.....	60
9. Perbandingan Rencana dan Realisasi Kredit 1983/1984.....	62



DAFTAR SINGKATAN



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBD	: Bank Bumi Daya
BCA	: Bank Central Asia
BDN	: Bank Dagang Negara
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BNI	: Bank Nasional Indonesia
Exim	: Ekspor impor
Ekuiin	: Ekonomi dan Industri
BPD	: Bak Pembangunan Daerah
Keppres	: Keputusan Presiden
KIK	: Kredit Investasi Kecil
LKBB	: Lembaga Keuangan bukan Bank
Jatim	: Jawa Timur
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MPRS	: Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun
PNB	: Produk Nasional Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah

- Perbanas** : Perhimpunan Bank-bank Swasta Nasional
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
PUT : Per Unit Telex
PUS : Per Unit Surat
SBI : Sertifikat Bank Indonesia
Susenas : Sensus Ekonomi Nasional
UU : Undang-undang



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Majalah Tempo, 16 Desember 1972.....	75
Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/2/UPUM/1983	76
Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. SE/16/8/UPUM/1984.....	78
Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. SE/16/1/UKU/1983.....	81
Koran Surabaya Post, Tahun XXXI No. 74, 31 Maret 1983.....	83
Majalah Tempo, No. 10, Th. XIII, 7 Mei 1983.....	84
Koran Jawa Pos, Tahun XXXI No. 278, 4 Juni 1983.....	85
Koran Jawa Pos, Tahun XXXI No. 278, 4 Juni 1983.....	86
Laporan khusus majalah Prisma Tahun XII, No. 7, Juli 1983.....	87
Majalah Tempo, No. 10, Th. XIII, 7 Mei 1983.....	88
Koran Surabaya Post, Tahun XXXI No. 144, 4 Juni 1983.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Suasana Toko emas yang diserbu pembeli setelah devaluasi.....	91
Suasana pengumuman devaluasi oleh Menteri ekuin di gedung Deppen.....	92
Usaha pembuatan keramik hasil kredit BPD Jatim.....	93
Bantuan Kredit BPD Jatim untuk pembangunan Jembatan di Magetan.....	94
Persebaran Kantor BPD Jatim di Propinsi Jatim.....	95



DAFTAR ISTILAH

- Annual Banker Dinner:** pertemuan tahunan para bankir
- Bank garansi** : jaminan bank
- Capital Flight** : pengalihan modal/dana ke luar negeri.
- Cost of money** : beban bunga pada simpanan atau pinjaman
- Deposito** : dana yang disimpan dalam suatu bank atau lembaga keuangan lain dalam periode waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu.
- Depresi ekonomi** : suatu keadaan perekonomian yang memburuk.
- Devaluasi** : tindakan suatu negara menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara lain, atau terhadap nilai emas
- Devisa** : seluruh saldo bank dalam valuta asing yang memiliki catatan kurs resmi bank Indonesia di luar uang logam.
- Inflantoir** : berasal dari kata inflasi, ketersediaan uang yang banyak di masyarakat yang melebihi batas.
- Inkaso** : jasa perbankan yang berguna untuk mempercepat peredaran uang di masyarakat.
- Inter bank rate** : tingkat suku antar bank
- Liberalisasi** : suatu paham yang mengedepankan kebebasan individu atas berbagai hal.
- Likuiditas** : Keseimbangan, kecukupan modal
- Merger** : Penggabungan lebih dari satu jenis usaha dengan cara salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain,

atau kedua pihak menggabungkan modal sehingga terbentuk usaha baru berdasar modal bersama.

- Proteksionisme** : kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dan memperketat impor.
- Restriktif** : kebijakan yang terlalu kaku dan ketat.
- Stagnan** : suatu keadaan yang tidak mengalami perubahan
- Overbought** : pembelian valuta asing oleh bank yang melebihi batas yang ditetapkan bank Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Istilah.....	xiv
Daftar Isi.....	xvi
Abstraksi.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KRISIS EKONOMI INDONESIA TAHUN 1980-an

A. Kondisi Ekonomi Indonesia 1967-1980.....	19
B. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia 1967-1980.....	22
C. Krisis dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 1980.....	24

BAB III KONDISI MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA 1967-1984

A. Perkembangan Perbankan Indonesia 1967-1984.....	28
A.1. Bank Umum Negara Nasional.....	31
A.2. Bank Umum Swasta Nasional.....	33
A.3. Perbankan Negara Tingkat Lokal.....	34
B. Kebijakan Moneter dan Perbankan 1967-1982.....	35

C. Kebijakan 1 Juni 1983.....	44
C.1.Struktur dan Tingkat Bunga.....	47
C.2.Tantangan Bank-Bank Swasta.....	49
C.3.Kebijakan Pelengkap 1 Juni 1983.....	51

BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN JUNI 1983: KASUS BPD JAWA TIMUR

A. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.....	54
B. Aktivitas BPD Jawa Timur Periode 1982-1983.....	56
B.1.Perkreditan.....	57
B.2. Bank Garansi, Tranfer, Inkaso dan Aktivitas Lainnya.....	58
C. BPD Jawa Timur Pasca Paket Juni 1983 hingga 1984.....	61
D. Dampak Kebijakan Juni 1983 terhadap BPD Jawa Timur.....	65

BAB V KESIMPULAN.....	68
-----------------------	----

Daftar Pustaka.....	72
---------------------	----

Lampiran.....	75
---------------	----



ABSTRAKSI

Perkembangan Indonesia di bawah pemerintahan orde baru mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sejak presiden Suharto memegang kekuasaan pada tahun 1966, pemerintah berusaha mengembangkan program stabilisasi sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Resesi yang melanda dunia pada periode 1980-an telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Resesi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah turunnya harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia mengalami defisit anggaran yang berat akibat turunnya harga minyak dunia dan menjadi salah satu faktor munculnya resesi ekonomi di Indonesia.

Dari fakta di atas, penulis mengambil satu permasalahan yaitu munculnya resesi dunia yang berdampak kepada resesi perekonomian Indonesia, sehingga seluruh sektor perekonomian khususnya bidang moneter dan keuangan merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Pokok pembahasan skripsi ini didasarkan pada 3 pokok permasalahan, yaitu : resesi ekonomi Indonesia , devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar AS, dan paket kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 sebagai salah satu solusi bagi perbaikan ekonomi Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sejarah, yang meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menemukan bahwa munculnya resesi ekonomi Indonesia pada periode 1980-an tidak lepas dari ketergantungan anggaran pemerintah kepada hasil penjualan minyak dunia. Tingginya harga minyak dunia pada periode 1970-an telah menjadikan pemerintah kurang mampu mengatasi persoalan defisit anggaran ketika harga minyak turun. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membawa Indonesia pada depresi perekonomian. Pemerintah berupaya untuk menyelamatkan defisit anggaran negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendevaluasi mata uang rupiah pada dollar AS pada bulan Maret 1983.

Kebijakan lain yang diambil pemerintah adalah liberalisasi perbankan pada bulan Juni 1983. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respon atas tuntutan perbankan khususnya perbankan milik negara yang meminta agar perbankan diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan khususnya dalam penentuan pagu kredit dan bunga baik pada simpanan maupun pinjaman. Kebijakan 1 Juni 1983 juga dimaksudkan sebagai antisipasi pemerintah untuk menarik dana-dana masyarakat yang ditempatkan pada perbankan luar negeri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tumbuh kembali dan diharapkan bisa memperbaiki kondisi makro ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai perbankan milik negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu objek dari keluarnya kebijakan liberalisasi perbankan. Secara umum, BPD Jatim mampu mengoptimalkan kinerjanya dengan keluarnya paket kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983.

Kata kunci : Resesi ekonomi, devaluasi, dan liberalisasi perbankan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia tahun 1980-an memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan dan peran perbankan di negeri ini. Pemerintah Indonesia masih disibukkan dengan kebijakan 30 Maret 1983 yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS,¹ sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak ekspor Indonesia keluar negeri. Gerak dan laju peredaran uang di tengah masyarakat pada paruh pertama tahun 1983 masih mengalami hambatan berat sebagai akibat dari situasi ekonomi Indonesia yang belum membaik setelah minyak bumi tidak lagi sebagai sumber pendapatan negara yang handal. Kebijakan lain untuk memperbaiki ekonomi Indonesia adalah liberalisasi perbankan pada Juni 1983. Kebijakan ini dinilai ampuh untuk memperbaiki perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan nasional pada era 80-an.

Dunia perbankan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi yang bergejolak tersebut. Efek paling nyata adalah meningkatnya pembelian dollar dalam jumlah yang besar sebelum kebijakan devaluasi pada Maret 1983, bahkan dalam satu hari terjadi

¹ Devaluasi adalah tindakan suatu negara menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara lain, atau terhadap nilai emas. Selama periode orde baru hingga berakhirnya Pelita III tahun 1984, pemerintah telah mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar 3 kali, yaitu tahun 1971, (US\$ 1 = Rp. 375 menjadi US\$ 1 = 415), tahun 1978 (US\$ 1 = Rp. 415 menjadi US\$ 1 = Rp. 625), tahun 1983 (US\$ 1 = Rp. 702 menjadi US\$ 1 = Rp. 970). Sumber: Jurnal P2EM FE Universitas Tarumanegara Jakarta, 1987.

pembelian dollar hingga US\$ 200 juta.² Akibatnya posisi likuiditas valuta asing di berbagai bank mengalami kemerosotan. Dana masyarakat yang disimpan di bank pemerintah dan swasta yang dihimpun oleh perbankan sampai dengan bulan Maret 1983 mengalami kenaikan. Hanya saja peningkatan tersebut tidak sebesar dana yang terhimpun dengan periode yang sama tahun 1982.³ Kondisi dana masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Kenaikan Dana Perbankan Maret 1981-1982 dan Maret 1982-1983.

Ket.	Maret 1982 dalam milyar Rp.	Kenaikan Maret 1982 terhadap Maret 1981 (%)	Maret 1983 dalam milyar Rp.	Kenaikan Maret 1983 terhadap Maret 1982 (%)
Giro	4.234	14,0	4.248	0,3
Deposito	831,1	10,3	905,8	9,0
Tabungan	399,8	24,4	483,8	21,0
Jumlah	5.464,9	34,7	5.637,6	3,03

(Sumber : *Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXI, No. 2, Juni 1983, hlm. 115*)

Upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia adalah dengan melakukan pengetatan kredit dari Bank Indonesia. Akibatnya bank sulit memberikan kredit kepada masyarakat. Pemerintah terus membahas mengenai langkah-langkah baru yang signifikan sebagai upaya untuk mendongkrak kinerja perbankan khususnya perbankan milik negara. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan peranan perbankan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus dilakukan. Upaya tersebut mulai

² *Laporan Khusus Prisma* Tahun XII, No. 7, 1983, hlm. 60

³ Kenaikan tersebut merupakan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama antara maret 1981 hingga maret 1982, berarti dalam satu tahun dana perbankan telah mengalami penurunan kurang lebih 10,8 kali lipat

nampak dengan dikeluarkannya *Kebijakan 1 Juni 1983* yang antara lain berisi kebijakan penghapusan pagu kredit, kebebasan bank-bank pemerintah menentukan sendiri tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga pinjaman.⁴

Keluarnya kebijakan 1 Juni 1983 berdampak pada tingkat kemandirian bank milik negara. Bank-bank tersebut tidak lagi menggantungkan hidupnya dari pinjaman likuiditas dengan tingkat bunga rendah dari Bank Indonesia sebagai dana murah. Kebijakan tersebut juga secara mutlak merubah situasi perbankan yang selama ini penuh dengan “aturan-aturan permainan dari pemerintah berubah menjadi suasana penuh dengan kebebasan dalam persaingan”.⁵ Hal ini membawa akibat pada meningkatnya bunga pinjaman oleh bank. Perbankan dituntut untuk mampu berinisiatif dan berkreasi secara bebas serta dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya di dalam pembangunan, di samping harus berusaha mencari dana sendiri.

Langkah kebijakan pemerintah yang dikenal dengan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983⁶ yang salah satu sarannya adalah untuk membendung dana domestik agar tidak hijrah keluar negeri, disusul pula dengan keluarnya kebijakan Bank Indonesia yang dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pergulatan dalam mencari dana dari masyarakat memang telah terjadi dalam perbankan. Hal tersebut tampak pada gencarnya iklan-iklan tentang suku bunga deposito yang dipasang oleh berbagai bank pemerintah, swasta

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia, No. 16/2/UPUM dan No. 16/7/KEP/DIR, 1983

⁵ Hal tersebut merupakan respon atas tuntutan perbankan, khususnya bank pemerintah yang selalu tergantung pada opsi-opsi yang dikeluarkan pemerintah, khususnya terhadap tingkat bunga, baik bunga pinjaman maupun deposito.

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia, No. SE.16/1/UKU, 1983

nasional dan juga swasta asing diberbagai media masa.⁷ Kebijakan 1 Juni 1983 dengan meningkatkan bunga deposito telah berdampak positif bagi dunia perbankan.

Kebijakan 1 Juni 1983 berpengaruh pula terhadap kinerja perbankan negara di daerah, yaitu bank pembangunan daerah. Kantor pusat bank pembangunan daerah terletak di masing-masing ibukota propinsi. Undang-Undang No. 1/1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah mensyaratkan setiap bank tersebut untuk membiayai proyek-proyek pembiayaan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.⁸

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan pada tahun 1961. Sebagai bank lokal dengan segmen pasar pada tingkat regional, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berusaha menunjukkan perannya dalam pembangunan di Propinsi Jawa Timur. Tuntutan situasi perekonomian nasional di satu pihak dan tuntutan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di pihak lain membawa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk bekerja lebih keras guna mendukung pembiayaan pembangunan di tingkat lokal.

Kerja keras Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ditandai dengan laju pertumbuhan yang mengalami kenaikan sumber pendanaan hingga sebesar 25,90 % sejak Maret 1983 hingga Maret 1984. Pendanaan tersebut

⁷ Laporan Khusus Prisma, loc. cit.

⁸ J.E.Panglaykim dan Pangestu, *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) di Indonesia* (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), hlm. 38

didapatkan dari kas pemerintah, swasta, dan perorangan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Realisasi kredit selama tahun anggaran 1983/1984 mencapai Rp. 16.004.711.000,-. Kredit perbankan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 1982/1983. Realisasi kredit selama pelita III mengalami peningkatan hingga 1255,55 %. Angka kredit tersebut digunakan pada kredit jangka pendek dan jangka menengah seperti kredit Inventaris Umum, kredit kelayakan, kredit berdasarkan Keppres 14/A 80 untuk membantu pengusaha pribumi golongan ekonomi lemah dan kredit lainnya.⁹ Data di atas memberikan gambaran mengenai posisi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada khususnya dan perbankan Indonesia pada umumnya terkait dengan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983.

Krisis yang melanda dunia mulai dirasakan di Indonesia sejak semester II tahun 1981 tidak terlepas dari upaya proteksionisme negara-negara industri yang menetapkan kuota impor dan tarif yang tinggi bagi barang-barang impor yang justru telah mulai disuplai oleh negara-negara berkembang.¹⁰ Kelesuan yang terus melanda pasar internasional dan berdampak pada penurunan ekspor minyak Indonesia selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 1982. Pada tahun 1981 nilai ekspor minyak mencapai US\$ 10,430 milyar dan turun US\$ 9,163 milyar pada 1982.

⁹ *Arsip Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur* (Surabaya: Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 1983), hlm. 10.

¹⁰ Suharsono Sagir, *Ekonomi Indonesia Menghadapi PELITA IV* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 62

B. Rumusan Masalah

Ekspor non migas mengalami penurunan 14,07% dimana pada tahun 1981 (Januari – September) sebesar US\$ 3,379 milyar, menjadi US\$ 2,903 milyar pada periode yang sama.¹¹ Berbagai guncangan perekonomian tersebut berpengaruh cukup besar terhadap laju peredaran uang di tengah masyarakat, setidaknya pada paruh pertama tahun 1983, setelah minyak tidak lagi menjadi sumber pendapatan negara yang dapat diharapkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 7 Januari 1983 yang selanjutnya berpengaruh pada melonjaknya tarif dan harga-harga barang lainnya, telah menyebabkan perekonomian Indonesia dilanda krisis.

Dunia perbankan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional ikut menjadi korban resesi ekonomi tersebut. Berbagai upaya untuk menolong permasalahan moneter seperti munculnya *capital flight* dan juga pembelian valuta asing dalam jumlah besar terus dilakukan hingga keluarnya kebijakan Devaluasi pada 30 Maret 1983 dan disusul dengan kebijakan Liberalisasi Perbankan 1 Juni 1983. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai salah satu anggota perbankan nasional merasakan dampak cukup signifikan terhadap berbagai permasalahan perekonomian tersebut. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang resesi ekonomi Indonesia yang terjadi tahun 1982 yang tidak lepas dari adanya krisis ekonomi dunia, hingga keluarnya kebijakan devaluasi mata uang rupiah 1 Maret 1983 yang disusul dengan kebijakan 1 Juni 1983 tentang liberalisasi

¹¹ *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXX, No. 4, Desember 1982, hlm. 376

perbankan. Dampak dari kebijakan tersebut terhadap Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai bank lokal di Propinsi Jawa Timur. Rincian rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada krisis tahun 1980-an ?
2. Mengapa kebijakan 1 Juni 1983 atau Liberalisasi Perbankan dikeluarkan oleh pemerintah ?
3. Seberapa jauh pengaruh kebijakan liberalisasi perbankan mampu menunjang perbaikan perbankan Indonesia pada tahun 1980-an khususnya perbankan lokal Jawa Timur (BPD Jatim) ?

C. Lingkup Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah penulisan ini, maka diperlukan lingkup penulisan secara jelas. Penelitian ini membahas tentang kebijakan dan aktivitas perbankan Indonesia di Jawa Timur pada masa krisis 1982-1984. Tema ini dipilih sebagai upaya mengetahui pengaruh yang dihasilkan atas lahirnya kebijakan pemerintah 1 Juni 1983 yang lebih dikenal dengan Liberalisasi Perbankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan ekonomi Indonesia khususnya dalam bidang keuangan dan moneter.

Batasan temporal yang dikaji adalah tahun 1982 hingga tahun 1984.¹² Pengambilan tahun tersebut sebagai awal kajian dari penulisan ini merupakan upaya untuk melihat pengaruh krisis perekonomian yang melanda Indonesia dan dunia. Untuk memperjelas lingkup penulisan dan menganalisa

¹² Tahun 1984 adalah akhir dari Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-3 (REPELITA III) yang menjadi program pembangunan andalan pemerintah orde baru pada masa Presiden Suharto.

permasalahan tersebut, tulisan ini mengulas tentang perekonomian Indonesia dan kebijakan yang diambil khususnya pada bidang moneter sejak pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967 hingga munculnya krisis ekonomi pada tahun 1980-an.

Keadaan perdagangan dunia yang tidak mengalami pertumbuhan (stagnan) pada tahun 1981 terus berlanjut pada periode tahun 1982, dimana mengalami pertumbuhan negatif (-1,9%) berpengaruh besar terhadap harga minyak bumi dan komoditi primer lainnya. Harga minyak bumi turun dari US\$ 34 menjadi US\$ 29 per barrel pada bulan Maret 1983, sedang akhir tahun 1982 harga komoditi primer lainnya juga mengalami penurunan pada titik terendah. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan penghasilan minyak bagi Meksiko US\$ 2,5 milyar, Venezuela US\$ 2,5 milyar.¹³ Kondisi yang sama terjadi di negara-negara penghasil minyak seperti Indonesia dan Arab Saudi. Keadaan ini menyebabkan banyak negara eksportir minyak mengalami defisit ekspor dan akhirnya menyebabkan negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia mengalami depresi ekonomi.¹⁴

Pemilihan batasan akhir pada 1984 atau pada akhir pelaksanaan Pelita III, tidak terlepas dari upaya untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan liberalisasi perbankan terhadap perbaikan kondisi ekonomi Indonesia. Liberalisasi tersebut selain merubah portofolio, juga menuntut prosedur kerja, organisasi yang sangat berbeda dengan sistem pagu dan kredit selektif yang diikuti dengan subsidi tingkat bunga pada masa sebelumnya. Sistem

¹³ *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol. XXXI, No. 2, Juni 1983, hlm. 101

¹⁴ *ibid*, hlm. 95

perbankan nasional yang didominasi oleh perbankan negara telah memberikan sekitar empat perlima dari seluruh volume kredit perbankan sehingga hampir seluruh pembiayaan di Indonesia besumber dari kredit perbankan. Sejak Januari 1984, Bank Indonesia telah memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam usaha secepatnya untuk menetapkan peraturan pelaksanaan pengaturan moneter setelah liberalisasi tersebut sehingga gerak perekonomian nasional menjadi lebih baik.¹⁵

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang krisis yang melanda perekonomian Indonesia dan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya, yang antara lain melalui kebijakan devaluasi mata uang rupiah dan liberalisasi perbankan 1983.
- b. Untuk mengetahui kinerja perbankan Indonesia pada umumnya dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada khususnya dalam upaya memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, khususnya pada tingkat lokal Propinsi Jawa Timur.

C.2. Manfaat Penelitian.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada masa krisis ekonomi

¹⁵ Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, No. 16/8/UPUM, 1984

tahun 1980-an, yang selanjutnya berpengaruh terhadap dunia perbankan khususnya perbankan lokal yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai inti dari pembahasan skripsi ini, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi hingga lahirnya kebijakan devaluasi 30 Maret 1983 dan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai peran dan posisi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terhadap berbagai kebijakan pemerintah di tingkat lokal.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memenuhi keotentikan sebuah penulisan, maka diperlukan sumber-sumber sejarah. Dalam penulisan ini dapat disebutkan beberapa karya terdahulu yang relevan untuk membantu penelitian ini sebagai sumber dan historiografi. Adapun karya-karya yang mendukung dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah karya Suharsono Sagir tentang *Ekonomi Indonesia menghadapi PELITA IV, Bandung, Penerbit Alumni, 1985*. Pada karyanya tersebut, Suharsono menjelaskan tentang dampak resesi dunia dan kenaikan harga BBM terhadap perbankan di Indonesia. Suharsono secara jelas menggambarkan berbagai permasalahan di sekitar terjadinya resesi, baik itu dikarenakan faktor eksternal, seperti kelesuan pasar dunia, turunnya harga minyak, dan kebijakan-kebijakan negara industri yang memberatkan negara-negara berkembang. Selanjutnya, permasalahan internal di dalam negeri seperti pembelian dollar AS, turunnya nilai tukar rupiah, menyebabkan defisit

anggaran dalam rencana APBN. Pembahasan atas dampak langsung resesi tahun 1980-an terhadap perbankan secara utuh khususnya perbankan daerah belum diulas dalam buku tersebut, sehingga tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam tulisan Suharsono.

J.E.Panglaykim dan Pangestu menulis tentang *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) di Indonesia, Jogjakarta, Andi Offset, 1984* memberikan gambaran tentang perjalanan perbankan di Indonesia termasuk juga bank-bank pembangunan daerah yang di dalamnya termasuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pembahasan mengenai berbagai langkah pemerintah dalam menghidupkan dunia perbankan baik itu melalui proses nasionalisasi perbankan kolonial atau juga penerbitan undang-undang yang mengatur tentang perbankan, seperti UU. Pokok Perbankan th. 1967 serta perundangan lainnya menjadi perhatian dalam karya ini. Kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 juga menjadi salah satu ulasan dalam buku tersebut.

Arsip Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur periode 1982/1983 dan 1983/1984 memberikan gambaran tentang keberadaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur termasuk tentang peranan dan posisinya di Propinsi Jawa Timur. Demikian juga dampak lain yang dialami dengan lahirnya kebijakan liberalisasi perbankan dan devaluasi mata uang rupiah selama periode tahun 1983. Ulasan tersebut cukup berarti untuk mendukung penulisan ini dalam upaya menjelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan resesi dunia serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Ulasan yang disampaikan oleh Aida Alisjahbana, dalam bukunya *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia dalam setengah abad terakhir, Jilid 4* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2005) juga memberikan sekilas gambaran atas kebijakan pemerintah pada dunia perbankan dengan dikeluarkannya kebijakan 1 Juni 1983, untuk merangsang dunia perbankan milik pemerintah agar dapat bersaing dengan perbankan swasta. Dampak atas lahirnya kebijakan tersebut kepada dunia perbankan, khususnya di tingkat lokal kurang mendapat pembahasan yang cukup, oleh sebab itu, tulisan ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.

F. Kerangka Konseptual dan Teori Penulisan.

Secara konseptual, liberalisasi merupakan suatu aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebaskan mungkin. Liberalisasi ekonomi berdasar pada keyakinan bahwa kemakmuran hidup dapat terwujud jika kebebasan individu diberikan dengan seluas-luasnya, dan pemerintah hanya melihat dan memonitor hal tersebut, sehingga segala tindakan yang dilaksanakan hanya dipengaruhi oleh terbentuknya harga, sehingga kemakmuran dapat terjamin. Dalam kehidupan perekonomian, hak milik swasta harus tetap dipertahankan dan menggunakan pola persaingan bebas, tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat persaingan bebas agar berlangsung positif dan tertib. Oleh karenanya, kaum Neo-Liberalisme menyetujui adanya campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu

dengan tidak memhatikan kebebasan. Pendukung aliran ini adalah Simon, Hayek dan Ropke.¹⁶

Berbagai permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia dalam periode tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ada. Dalam dunia perbankan nasional, khususnya perbankan milik negara terlalu dimanjakan dengan adanya subsidi bunga dan menjadikan perbankan pemerintah kurang inisiatif dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut menjadikan pemerintah mengalami kesulitan dalam keuangan akibat pendapatan yang berkurang dan neraca yang defisit. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Central Asia (BCA) Mochtar Riadi bahwa subsidi bunga Bank Indonesia (BI) pada kredit yang diberikan bank-bank milik pemerintah sebagai sesuatu yang tidak realistis, dan secara tegas dia menyatakan bahwa subsidi harus dikurangi dan nantinya dihapuskan.¹⁷

Penulisan skripsi ini termasuk dalam penulisan sejarah deskriptif analisis, yang mencoba mendeskripsikan masa lampau dengan merekonstruksikan apa yang terjadi dengan data-data statistik yang ada dan menguraikannya dalam bentuk cerita. Dengan kata lain, kejadian-kejadian penting diseleksi dan diatur menurut urutan waktu sehingga tersusun sebagai cerita. Pada tahap awal pengkajian, peneliti menetapkan bagaimana mendekati objek studi dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini.

¹⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid II (Jakarta : PT. Cipta Adikarya, 1990),*
hlm. 376

¹⁷ *Laporan Khusus Prisma, loc. cit.*

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Ekspektasi Rasional (*Theory of Rational Expectations*), yang merupakan salah satu bagian penting dari paham kontra revolusioner para pemikir ekonomi (termasuk kaum Neo-Liberalisme) yang menentang mazhab Keynes dan Neo-Keynes. Titik tolak dari pemikiran teori ini adalah dalil umum dan tradisional yang mendasari teori ekonomi, yaitu : perilaku ekonomi pada dasarnya bersifat rasional. Dalam pengertian lain, para pelaku ekonomi bersifat rasional dalam mengadakan pilihan ekonomi dan mengambil keputusan ekonomi. Dalam proses menuju pengambilan keputusan, pelaku ekonomi mengandalkan pengalaman dan pengetahuannya dari masa lalu dan masa kini, yang ditunjang dengan segenap informasi dan data yang tersedia tentang keadaan pasar plus perkiraan-perkiraan mereka tentang perkembangan di masa datang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Robert Lucas dan Thomas Sargent pada tahun 1981.¹⁸

Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami bagaimana pemerintah mencoba berfikir rasional dalam mengelola perbankan khususnya perbankan milik negara sebagai salah satu pilar ekonomi yang seyogyanya diberikan kebebasan dengan melihat perkembangan pasar. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada perbankan negara untuk bergerak lebih luas dalam dunia usahanya, dengan memberikan kebebasan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam perbankan, baik milik negara maupun swasta, sehingga berbagai persoalan perekonomian yang berdampak

¹⁸ Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. 149

pada kehidupan perbankan dapat dihadapi lebih baik dan menyelesaikannya dengan cepat.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan interdisipliner seperti ekonomi, sosiologi, dan politik. Permasalahan ekonomi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada persoalan internal dalam negeri saja, namun selalu terkait dengan berbagai kebijakan yang telah muncul seperti rencana pembangunan lima tahun dan juga kebijakan negara-negara lain. Resesi yang melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1980-an, adalah imbas dari berbagai kebijakan sebelumnya yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti acuan anggaran pemerintah terhadap ekspor minyak, dan juga berbagai beban subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga diperlukan usaha-usaha baru untuk mengatasi persoalan tersebut. Kebijakan 30 Maret 1983 yang dikeluarkan untuk mendevalusi mata uang rupiah terhadap dollar AS dan kebijakan 1 Juni 1983 tentang liberalisasi perbankan merupakan salah satu bentuk kebijakan atas permasalahan yang saling berkaitan. Keberadaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai bank pembangunan di Propinsi Jawa Timur merupakan wujud dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Seiring dengan lahirnya kebijakan liberalisasi perbankan, seyogyanya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur turut menyesuaikan dengan hal tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah yang mencoba merekonstruksi tentang berbagai kebijakan moneter serta perekonomian secara umum pada masa Orde Baru dan kemudian berbagai permasalahan yang melingkupi Indonesia pada masa krisis tahun 1982, serta berbagai kebijakan yang terkait dengan perbankan pada periode 1982 hingga semester awal 1984 secara sistematis dan objektif. Dengan cara mengumpulkan sumber-sumber sejarah, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesakannya, untuk memudahkan dalam memahami dan menyajikannya dalam bentuk tulisan.

Adapun metode sejarah yang digunakan pada penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Heuristik dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan seperti yang terdapat dalam buku-buku tentang perekonomian dunia dan Indonesia, kantor arsip, perpustakaan Bank Indonesia, perpustakaan Medayu Agung, dan juga dokumen-dokumen dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
2. Kritik sumber, dilakukan untuk menguji atas keotentikan dari sumber yang didapatkan kritik disini dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Dalam kritik ekstern berfungsi melakukan pengujian terhadap keotentikan, keaslian, turunan, palsu serta relevan tidaknya suatu sumber sedang dalam kritik intern berfungsi melakukan pengujian terhadap isi atau kandungan sumber yang telah diujikan dalam kritik ekstern.

3. Interpretasi, pada tahap ini dilakukan pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari data yang ada kemudian mencari berbagai hubungan dari berbagai fakta yang telah ditemukan dan kemudian menafsirkannya.
4. Historiografi, pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan, disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan metode penulisan serta sistematika penulisan. Semuanya itu untuk menjelaskan dan memudahkan pembaca dalam memahami bab ini.

Bab II membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia, yang terkait di dalamnya berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru pada kurun 1967 hingga munculnya krisis ekonomi dunia akibat dari merosotnya harga minyak dunia dan berbagai persoalan lainnya pada tahun 1982

Bab III, mendeskripsikan tentang aktivitas perbankan Indonesia, yang terkait didalamnya berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru pada kurun 1982 hingga tahun 1984 dengan berbagai permasalahannya. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan melakukan devaluasi rupiah atas dollar AS pada 30 maret 1983 dan memberikan kebebasan perbankan

¹⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosutanto* (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 34

negara dalam menentukan kebijakannya yang dikenal dengan kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983.

Bab IV akan diarahkan pada pembahasan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai pokok dari pembahasan skripsi ini, serta dampak yang dialaminya atas lahirnya kebijakan 1 Juni 1983.

Bab V. Kesimpulan, merupakan ringkasan singkat tentang inti dari skripsi ini yang juga merupakan penutup kesimpulan.

Daftar pustaka.



BAB II

KRISIS EKONOMI INDONESIA TAHUN 1980-an

A. Kondisi Ekonomi Indonesia 1967-1980

Dasawarsa 60-an merupakan masa sulit bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia. Tingkat produksi dan investasi di berbagai bidang menunjukkan kemunduran sejak tahun 1950. Sektor industri yang menyumbangkan sekitar 10 % dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dihadapkan pada masalah pengangguran yang serius.¹ Hal tersebut mulai berubah ketika terjadi transisi pemerintahan dari Sukarno kepada Suharto. Pemerintahan baru menentukan prioritas utamanya atas pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Perekonomian Indonesia pada masa orde baru mulai menunjukkan beberapa perubahan serta kesinambungan. Perbaikan, terutama pada perubahan ekonomi dan sosial yang di antaranya memberikan manfaat kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Suharto.

Manfaat serta perkembangan yang terlihat setelah dikeluarkannya program pembangunan lima tahun, merupakan tindak lanjut dari usaha stabilisasi ekonomi pemerintah orde baru, yang dapat dilihat pada keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat keberhasilan dari sudut pandang *makro* dapat dilihat pada tiga tolok ukur. Tolok ukur pertama adalah tingkat pendapatan nasional bruto (PNB). PNB Indonesia pada kurun antara

¹Anne Both dan Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm.1

1970 hingga 1980 meningkat rata-rata 7,8 % per tahun.² PNB Indonesia pada awal pencanangan Pelita I masih berkisar pada tingkat Rp. 5.182 milyar dan pada tahun 1980 telah mencapai Rp. 10.953,9 milyar. Tolok ukur kedua dapat dilihat dari kemampuan mengendalikan inflasi. Pada masa orde lama, Indonesia pernah dihantui inflasi yang mencapai 600 % pada tahun 1966. Sejak Pelita I dicanangkan hingga tahun 1981, rata-rata inflasi berkisar pada titik 7 %. Tolok ukur ketiga dapat dilihat dengan menyimak perdagangan internasional, dimana data yang ada menunjukkan bahwa nilai perdagangan tersebut telah mencapai titik positif. Nilai ekspor total hingga tahun anggaran 1981/1982 telah mencapai US\$ 22.470 juta, sedang impor hanya US\$ 12.00 juta.³

Beberapa hasil yang ditunjukkan secara makro tersebut memberikan harapan bagi tumbuhnya perekonomian Indonesia. Pada tahun 1970, sumbangan sektor industri pada pendapatan nasional bruto (PNB) masih berkisar Rp 435 milyar dan pada tahun 1980 telah mencapai Rp. 1.568,9 milyar. Dengan pertumbuhan itu, ekonomi Indonesia naik rata-rata 13 % per tahun. Pada sektor pertanian di tahun 1970 menyumbangkan Rp. 2.356 milyar pada PNB dan pada tahun 1980 naik hingga mencapai Rp. 3.438,5 milyar atau meningkat rata-rata 3,8 % per tahun.⁴ Data-data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sektor pertanian atas PNB rata-rata per tahun bila dibandingkan dengan sektor industri jauh lebih kecil. Data tahun 1971

²Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo, *Pembangunan di Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit Ananda, 1983), hlm. 4

³*Harian Kompas*, edisi 4 Agustus 1981.

⁴Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo, *op. cit.*, hlm. 5

menunjukkan bahwa 64,2 % angkatan kerja di Indonesia berada pada sektor pertanian, dan pada tahun 1981 masih berada pada kisaran 55 %. Sebaliknya mereka yang bekerja pada sektor industri hanya 6,5 % pada tahun 1971 dan 7,5 % pada tahun 1980.⁵ Dari perbandingan tersebut, secara umum dapat dilihat bahwa kenaikan PNB yang cukup tinggi tersebut belum dinikmati oleh mereka yang berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja pada sektor pertanian. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri, karena perkembangan ekonomi Indonesia hanya dilihat dengan sudut pandang makro saja.

Perekonomian Indonesia pada masa orde baru salah satunya di topang oleh keuntungan dari hasil penjualan minyak dunia yang mencapai kenaikan empat kali lipat pada periode 1973 hingga 1980. Keuntungan yang diperoleh dari tingginya harga minyak sebenarnya merupakan berkah yang harus diawasi secara ketat. Uang yang diperoleh dari minyak digunakan untuk membayar cicilan hutang dan berbagai sarana lainnya. Jatuhnya harga minyak dunia dan beban hutang yang jatuh tempo pada tahun 1980-an menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami depresiasi ekonomi. Hutang Indonesia pada tahun 1980 telah mencapai 28 % dari pendapatan domestik bruto (PDB), atau 21 miliar dollar AS.⁶ Adanya usaha dari negara industri seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk mengurangi tingkat pengangguran yang mencapai 5-8% dengan melakukan upaya proteksionisme seperti pemberlakuan *Multifiber Arrangement* (pengaturan terhadap barang-barang

⁵ *ibid*, hlm. 10

⁶ Hal Hill, *Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966* (Yogyakarta : PAU UGM-PT. Tiara Wacana, 1996), hlm. 105

dari serat) sebanyak 15 % dari komoditi ekspor negara. Pengaturan ini telah memberikan dampak negatif terhadap laju ekspor negara seperti Indonesia, sehingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak membaik.⁷

B. Kebijakan dan Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia 1967-1980

Sejak dilaksanakannya sistem ekonomi berencana dengan program pembangunan lima tahun (pelita) pada masa orde baru, perekonomian Indonesia menjadi semakin terkontrol, dengan makin luasnya campur tangan pemerintah dan meningkatnya pengawasan administratif langsung. Pemerintah tidak banyak menghilangkan sistem pengawasan langsung yang timbul dalam jaman penjajahan dan lebih diperketat pada masa ekonomi orde baru.

Hasil pembangunan berencana yang telah dilaksanakan di Indonesia semenjak memasuki Pelita I pada tahun 1969, pada satu sisi terdapat hasil yang cukup memuaskan. Pelita I dan II yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai isu nasional telah menunjukkan hal tersebut. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan PNB cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dimana Indonesia pada tahun 1982 telah masuk pada negara berpenghasilan menengah, dengan pendapatan per kapita 520 dollar AS per tahun. Padahal pada tahun 1979, penghasilan rata-rata per kapita Indonesia masih 379 dollar AS dan meningkat 420 dollar AS pada tahun 1980, dan jika dihitung semenjak

⁷ *Laporan Pembangunan Bank Dunia*, Terjemahan Pandan Guritno (Jakarta: UI.Press, 1983), hlm. 30

tahun 1969 hingga 1980, pendapatan per kapita di Indonesia telah meningkat rata-rata 7,8 % per tahun.⁸

Data-data di atas memperlihatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, model pertumbuhan yang berorientasi pada peningkatan PNB, telah menimbulkan ketidakadilan pembagian pendapatan dan pada tahap selanjutnya menyebabkan timbulnya pengangguran. Data sensus tahun 1980 membuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih berkisar pada 2,34 % per tahun. Hal tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan perkiraan semula yang hanya 2,0 % per tahun. Hasil sensus ekonomi nasional (susenas) 1976, sekitar 40,0 % golongan penduduk termiskin hanya menikmati 11,5 % dari pendapatan nasional, sedangkan 40,0 % penduduk golongan menengah dan 20,0 % golongan kaya masing-masing menikmati 32,12 % dan 58,73 % dari pendapatan nasional. Pada dasawarsa tujuh puluhan, laju pertumbuhan angkatan kerja menunjukkan angka 3,1 % sedang laju pertumbuhan kesempatan kerja hanya 2,7 %, sehingga terjadi penumpukan pengangguran terbuka.⁹ Masalah ketimpangan kesempatan kerja semakin terasa, sebagai akibat tingginya pengangguran terbuka di satu pihak dan kekurangan tenaga yang berketrampilan memadai di lain pihak.

⁸ Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo, *op. cit.*, hlm. 41

⁹ *ibid.*, hlm. 42

C. Krisis dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 1980.¹⁰

Setelah hiperinflasi yang melanda Indonesia pada tahun 1960-an, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melancarkan program stabilisasi. Menjelang akhir tahun 1979, situasi ekonomi Indonesia terutama diliputi oleh kesulitan keuangan (devisa), akibat adanya klaim luar negeri terhadap Pertamina, yang secara tidak langsung telah menyedot cadangan devisa pemerintah, sehingga pemerintah harus mencari bantuan ke luar negeri untuk menalangi krisis devisa melalui bantuan konsorsium bank-bank luar negeri. Hal ini dilakukan agar neraca pembayaran tidak mengalami defisit.¹¹

Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor ekstern, yang terkait dengan keadaan perekonomian negara-negara lain. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu contoh dari faktor ekstern, sehingga kalau ada gangguan dalam perdagangan luar negeri dapat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Sektor minyak merupakan contoh perdagangan luar negeri yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, karena perdagangan minyak mempunyai andil 65 % dari total ekspor Indonesia pada periode 1981/1982 dan turun menjadi 62 % pada periode 1982/1983. Faktor kedua dan ketiga bersifat intern, yaitu kebijakan anggaran dan kebijakan moneter. Pemerintah orde baru dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi berdasar pada kemampuan anggaran dan kekuatan anggaran negara tergantung pada

¹⁰ Krisis ekonomi merupakan sebuah keadaan dimana tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah Negara mengalami penurunan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai factor, seperti turunnya pendapatan negara, meningkatnya pengangguran, dll.

¹¹ S.Y.Lee dan Y.C. Jao, *Struktur Keuangan dan Kebijakan Moneter di Asia Tenggara* (Jakarta : Bina Aksara, 1981), hlm. 22

penerimaan penjualan minyak dunia, yaitu 65 % dari total anggaran negara.¹²

Pada akhir tahun 1982, dan memasuki tahun anggaran 1983-1984 yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Pelita III, belum diperoleh kepastian mengenai berakhirnya krisis ekonomi dunia. Posisi cadangan devisa Indonesia telah merosot dari 6.559,9 juta dollars AS pada akhir Januari 1982, menjadi 4.725,7 juta dollars AS akhir Juli 1982 atau merosot 1.834,2 juta dollars AS dalam masa tujuh bulan semenjak bulan Januari 1982.¹³

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia pada tahun 1983 sehingga menyebabkan defisit anggaran negara, kebijakan mendevaluasi rupiah merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tujuannya sudah jelas, selain untuk merangsang kembali ekspor di luar minyak bumi, juga untuk mengamankan cadangan devisa yang sudah merosot. Tindakan devaluasi pertama dilakukan pada bulan November 1978 yang menyebabkan melonjaknya kembali inflasi. Dampak dari kebijakan itu adalah menurunnya kepercayaan masyarakat yang salah satunya terjadi pelarian modal keluar negeri. Respon pemerintah terhadap kondisi itu adalah dengan melakukan pengendalian harga baik pada tingkat produksi maupun tingkat eceran.

¹² *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXX, No. 4, Desember 1982, hlm. 375

¹³ Soeharsono Sagir, *Masalah Ekonomi Indonesia 82* (Bandung : Penerbit Angkasa, 1982), hlm. 62

Krisis ekonomi dunia yang bersumber antara lain dari penurunan harga minyak dari US\$ 34,53 menjadi US\$ 29,50 pada tanggal 23 Februari 1983 telah mengurangi devisa dan biaya pembangunan dalam APBN, sehingga stabilitas moneter Indonesia mulai goyah. Pada bulan Maret 1983 dilakukan tindakan devaluasi rupiah terhadap dollar AS yang mencapai 38 % dan merupakan angka penyesuaian terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁴

Untuk menjamin nilai tukar rupiah yang stabil, diisyaratkan bagi bank sentral untuk memiliki cadangan devisa yang cukup, sehingga dengan suplai yang cukup besar untuk menghadapi permintaan valuta asing, maka nilai rupiah dapat dikendalikan. Pengendalian terhadap transaksi valuta asing dengan mekanisme mengambang terkendali merupakan alternatif lain agar nilai tukar rupiah terhadap valuta asing tetap stabil

Terjadinya pembelian valuta asing (devisa) secara besar-besaran oleh bank-bank devisa, baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara merupakan dampak dari situasi perekonomian nasional yang sedang mengalami resesi. Pembelian valas dilakukan bank-bank tersebut sebagai usaha pengamanan dalam menghadapi resiko kerugian sebagai akibat mekanisme mengambang terkendali yang ternyata tidak berhasil menahan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

¹⁴ *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII, No. 1, Maret 1984, hlm. 11

Tabel 2**Posisi transaksi jual beli devisa Januari s/d September 1982(dalam juta US\$)**

No	Bank Umum	Pembelian	Penjualan	Selisih lebih ¹⁵
1	Bank Milik Negara	2.842	872	1.970
2	Bank Swasta Nasional	3.295	41,1	3.253,9
3	Bank Swasta Asing	2.404	100,9	2.303,1
	Jumlah	8.541	1.014,0	7.527,0

(sumber : *Jurnal Ekuin, Jakarta, 3 Desember 1982*)

Dari tabel 2 terlihat bahwa bank umum negara turut bermain dalam rush valuta asing, bahkan pembeliannya lebih besar dari bank umum milik swasta asing, walaupun dalam penjualannya menunjukkan transaksi terbesar. Menurut ketentuan perundangan yang berlaku, bank umum negara seharusnya turut serta dalam menjamin stabilitas moneter, menjamin kelancaran lalu lintas devisa, melakukan penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui penciptaan kredit sesuai dengan kebijakan dari bank sentral.

Aktivitas perbankan yang demikian ikut andil dalam memperburuk kondisi perekonomian Indonesia secara mikro, karena tidak menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari sisi makro, kegiatan pembangunan yang digalakkan pemerintah Indonesia sepenuhnya tergantung pada pembiayaan perbankan yang dananya dikucurkan dari hasil penjualan minyak dan bantuan luar negeri.

¹⁵ Selisih lebih merupakan tambahan cadangan devisa bank-bank umum, baik milik pemerintah, swasta nasional maupun asing dan bank umum devisa cenderung untuk menggunakan dollar amerika sebagai akibat dari reagonomics atau kebijakan presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.

BAB III

KONDISI MONETER DAN PERBANKAN INDONESIA 1967-1984

A. Perkembangan Perbankan Indonesia 1967-1984

Persoalan yang terus melanda perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap keadaan moneter. Berbagai kebijakan yang menunjang terciptanya sistem perekonomian yang sinergis terus diupayakan dan salah satunya adalah dalam bidang moneter dan perbankan. Sektor perbankan atau sektor keuangan formal di Indonesia dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan hanya terdiri dari beberapa bank saja. Orientasi perbankan saat itu terutama tertuju pada pembiayaan dan kelancaran perdagangan internasional, sehingga terbuka kesempatan untuk memperluas kegiatan perbankan.

Menjelang tahun 1965, bank-bank umum tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara normal. Inflasi telah menjadi batu sandungan kegiatan perbankan seperti untuk menarik dana dari masyarakat dan juga fungsi peminjaman. Seluruh sektor perbankan berperan hanya sebagai penambal defisit APBN. Bank-bank milik pemerintah seperti BNI, BRI, dan BBD telah berubah fungsinya menjadi salah satu saluran penciptaan uang, dan mereka menjadi semacam cabang dari bank sentral dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia.¹

Struktur kelembagaan perbankan pada masa orde baru lahir tidak jauh berbeda dengan keadaan seperti rezim sebelumnya, karena mereka hanya

¹ Anne Both dan Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 133

menjadi pewaris atas tinggalkan dari rezim sebelumnya. Dalam upayanya untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah orde baru mulai mengurangi peranan atau campur tangan pemerintah secara langsung dalam kehidupan ekonomi, dengan lebih mengandalkan kekuatan pasar dan memberi kesempatan kepada sektor swasta untuk mengambil peranan lebih besar dalam perekonomian. Pada tahun 1967 konglomerasi perbankan yang merupakan peleburan administrasi dari bank-bank milik pemerintah dihapus.

Kebijakan yang diberlakukan terhadap perbankan pemerintah berimbas terhadap bank-bank milik swasta, sehingga dapat menikmati iklim usaha yang lebih baik setelah tahun 1968. Banyak diantara bank swasta yang mulai bermunculan dan mulai menjalankan usahanya seperti penarikan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Di samping itu, jasa peminjaman juga terus berjalan. Pada tahun tersebut, bank-bank asing mulai diizinkan untuk beroperasi meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Perkembangan kelembagaan ini telah memperlancar aliran modal dalam jumlah yang besar ke dalam negeri. Dari semua aspek tersebut, dapat dipahami bahwa sektor perbankan merupakan bagian yang paling penting dari sektor keuangan resmi secara keseluruhan.

Sektor perbankan pada periode tersebut (1967) telah membiayai sebagian dari penanaman modal dalam negeri dan menyediakan kredit perdagangan kepada para pengusaha yang sudah mapan dan sejumlah dana kepada pengusaha kecil dan menengah. Sektor ini masih menghadapi banyak masalah. Dunia perbankan khususnya perbankan pemerintah masih

menghadapi intervensi yang cukup besar dari pemerintah. Walaupun kemudian, sudah ada upaya-upaya untuk mengarahkan perkembangan perbankan kepada penggunaan kekuatan-kekuatan pasar. Sebagai gambaran terdapat upaya untuk mengarahkan kredit perbankan pada bidang-bidang yang memperoleh prioritas dan adanya pengendalian langsung penentuan plafon kredit. Tingkat bunga deposito dan pinjaman pada bank-bank pemerintah masih ditentukan oleh Bank Indonesia dan pemberian kredit panjang masih dibatasi. Bank Indonesia beralasan bahwa sektor keuangan yang baru tersebut masih diperlukan pengawasan.²

Usaha-usaha pemerintah dalam menggunakan sektor perbankan untuk membantu para pengusaha kecil pribumi dan membatasi peranan yang terlalu dominan dari pengusaha non pribumi belum menunjukkan hasil. Tujuan ganda yang ditugaskan kepada bank-bank pemerintah tidak selalu serasi satu sama lain. Bank diharapkan menjadi suatu badan usaha yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan bank-bank swasta. Di lain pihak, bank dapat membantu tugas pemerintah untuk membantu pengusaha kecil menengah dalam penyediaan dana, meskipun tanpa disertai jaminan yang cukup dan memenuhi syarat. Dilema yang dihadapi oleh perbankan pemerintah adalah adanya perbedaan sistem dengan perbankan swasta yang bebas untuk melakukan operasi dengan para nasabahnya dan menerapkan prosedur-prosedur perbankan konvensional tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Bagi bank-bank pemerintah, mengemban tugas pembangunan berarti

² Anne Both dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 138

harus membiayai proyek-proyek pemerintah yang bisa jadi proses kelayakannya masih harus dipertanyakan.

A.1. Bank Umum Negara Nasional

Upaya penataan kembali perekonomian nasional yang merosot akibat gejolak politik dalam pemerintahan orde lama. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1966 menyerukan agar disusun Undang-undang Bank Sentral. Upaya MPRS ini terealisasi dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan disusul dengan terbitnya Undang-undang No.13 1968 tentang Bank Sentral pada tanggal 1 Januari 1968. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, terdapat 5 (lima) bank umum milik negara dan merupakan bank devisa, yaitu : BNI 46, BDN, BBD, BRI, dan Bank EXIM.³ Lapangan usaha perbankan tersebut adalah menarik dana dan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito yang kemudian disalurkan melalui penciptaan kredit pendek, menengah, dan panjang, di bawah pengawasan bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank umum milik negara sebagai sub sistem moneter merupakan bagian atau komponen utama yang harus turut aktif membantu misi dari bank sentral yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah dan turut serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Bank umum milik negara sebagai bank devisa juga berhak membeli devisa yang dijual kepada masyarakat. Bank umum milik negara tidak

³ Magdalena Lumbatoruan dan B. Soewartoyo, *Ensiklopedi Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Jilid 2* (Jakarta: PT.Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 124

dibenarkan untuk secara aktif dengan sengaja membeli atau mendorong devisa (dalam arti mengambil inisiatif), yang dapat mengganggu stabilnya nilai tukar rupiah. Kelebihan likuiditas rupiah bagi bank umum milik negara yang berakibat meningkatnya beban bunga (*cost of money*) terutama bagi simpanan masyarakat dalam bentuk giro maupun deposito berjangka, bagaimanapun juga tidak dapat dibenarkan oleh bank sentral untuk ditekan melalui usaha pembelian valuta asing secara aktif, dengan suatu perhitungan mengurangi resiko kerugian dari beban bunga yang ada.⁴

Hal inilah yang dapat dilihat pada bank-bank umum milik negara. Mereka cenderung untuk berpreferensi membeli valuta asing, terutama dollar Amerika dan berusaha sedapat mungkin untuk menolak deposito berjangka 24 bulan, alasannya jelas untuk mengurangi resiko beban bunga yang terlalu berat, akibat kelebihan likuiditas rupiah. Di satu pihak, masyarakat yang percaya terhadap rupiah, oleh karena bunga deposito berjangka masih lebih tinggi dari tingkat inflasi, tetapi di pihak lain bank umum negara justru tidak percaya nilai rupiah, lalu mengalihkan usahanya dari keharusan menciptakan kredit (oleh karena dibatasi oleh bank sentral) pada usaha membeli secara aktif valuta asing yang beredar di pasaran sehingga terjadi apa yang dinamakan dengan *overbought* atau pembelian berlebih.

Dengan keluarnya paket ekspor Januari 1982,⁵ eksportir bebas untuk menahan devisa hasil ekspornya untuk dijual menurut kurs yang berlaku di pasar bebas, dan tidak ada keharusan untuk menjualnya kepada bank sentral.

⁴ *ibid*, hlm.125

⁵ Soeharsono Sagir, *Masalah Ekonomi Indonesia 82* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), hlm. 10.

Jika pembelian valuta asing oleh bank umum negara dilakukan karena adanya penawaran dari eksportir yang membutuhkan uang rupiah, dapat dipahami sebagai sesuatu yang wajar, sebagai bank pemerintah maka bank umum negara harus melakukan pembelian dan yang menjadi masalah adalah, sampai sejauh mana pembelian valuta asing oleh bank umum milik negara berjalan wajar.

A.2. Bank Umum Swasta Nasional.

Bank umum swasta nasional merupakan salah satu pendukung perkembangan dunia perbankan nasional. Jumlah bank dan kantor bank-bank swasta nasional yang terdaftar sebagai anggota perbanas hingga tahun 1980-an terdiri atas Bank Umum Swasta 80 buah dan bank tabungan swasta 5 buah.⁶ Baik bank umum swasta nasional maupun asing, dapat sepenuhnya dimengerti untuk bertindak sebagai bank komersial yang berorientasi pada pengejaran laba usaha dari jasa perbankan yang dijualnya. Oleh karenanya, bank swasta juga melakukan usaha penerimaan deposito berjangka dalam nilai dollar AS, dimana pemegang deposito melakukan penyetoran rupiah menurut nilai tukar yang berlaku pada saat melakukan penyimpanan.

Bank umum swasta lapangan usahanya sama dengan bank umum milik negara, tetapi dilihat dari misi yang diembannya berbeda dengan bank umum milik negara. Bank umum swasta baik asing maupun nasional, melakukan pembelian berlebih pada valuta asing untuk mengamankan likuiditas rupiahnya selama tidak melanggar ketentuan dari bank sentral, dapat

⁶Magdalena Lumbatoruan dan B. Soewartoyo, *op. cit.*, hlm. 125

dinyatakan sebagai hal yang wajar. Sebagai sub sistem dari sistem moneter, perbankan swasta tidak dibebani tugas untuk menjaga stabilnya nilai rupiah. Selama bank-bank tersebut menjalankan usaha sesuai dengan petunjuk bank Indonesia sebagai bank sentral, khususnya pembatasan-pembatasan yang telah diterapkan, maka selama itu mereka berhak bertindak sebagai bank umum atau bank komersial

A.3. Perbankan Negara Tingkat Lokal

Pertumbuhan perbankan di Indonesia memberikan arti yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan dari perbankan yang tumbuh dan berkantor pusat di masing-masing daerah perlu diperhatikan, khususnya perbankan milik pemerintah daerah. Adapun bank pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah bank pembangunan daerah seperti Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tugas pokok dari bank pembangunan daerah menurut undang-undang tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah No.13/1962 adalah mengusahakan pembiayaan proyek-proyek pembangunan daerah dalam rangka melengkapi proyek-proyek pembangunan semesta dengan jalan menghimpun dan mengerahkan dana-dana pemerintah dan masyarakat daerah. Secara struktural bank-bank tersebut berada di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, namun secara teknis perbankan dan teknis perusahaan bank-

bank tersebut berada di bawah pengawasan dan bimbingan Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.⁷

Propinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki arti penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional juga menjadi salah satu daerah berkembangnya perbankan. Pada Akhir Pelita III (1984), telah berdiri 2674 bank, baik yang dimiliki oleh swasta maupun negara di Propinsi Jawa Timur.⁸ Salah satu bank yang memiliki arti penting bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank tersebut merupakan bank pembangunan milik daerah yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Daerah tingkat I (propinsi) dan Pemerintah Daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya). Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah membuka cabang di 13 Kabupaten/Kotamadya pada tahun 1984.⁹

B. Kebijakan Moneter dan Perbankan 1967- 1982

Kebijakan moneter ditujukan untuk stabilitas moneter dan untuk mencapai sasaran rencana pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pelita I hingga Pelita III. Sasaran kebijakan yang hendak dicapai terdiri atas beberapa hal, seperti pengendalian jumlah uang yang beredar, turunnya defisit anggaran negara hingga masalah penyediaan dana untuk tujuan-tujuan tertentu yang memperoleh prioritas utama.

⁷ J.E.Panglaykim dan Pangestu, *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) di Indonesia* (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), hlm. 39

⁸ *Data Perbankan Jawa Timur* (Surabaya: Kordinator Bank Indonesia Jawa Timur, 1985), hlm. 5

⁹ Bank Jatim telah membuka cabang di 16 kabupaten/kota dan 1 Propinsi Jawa Timur, antara lain: Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Kab. Jember, Banyuwangi, Madiun, Kediri. (sumber : Arsip BPD Jatim 1984)

Kebijakan devaluasi mata uang rupiah pada 30 Maret 1983 dikeluarkan sebagai usaha dari pemerintah untuk menutup defisit anggaran negara dan memperkuat modal pembangunan. Menteri Ekuin Ali Wardhana menyampaikan bahwa posisi ekonomi Indonesia mengalami kesulitan sebagai dampak dari turunnya harga minyak dunia, dimana sektor minyak merupakan pemasukan utama (70%) dari anggaran negara.¹⁰

Kebijakan tersebut memberikan dampak cukup signifikan terhadap defisit anggaran negara yang mencapai 4 milyar dollar AS dapat berkurang. Penerimaan Indonesia dari ekspor minyak dapat meningkat Rp. 29.000,- dari pendapatan sebelumnya Rp. 20.000,- tiap barrel, walaupun penerimaan dalam dollar AS tetap US\$ 29 tiap barrel.¹¹ Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut adalah penyesuaian beberapa proyek pembangunan negara, seperti pembangunan jalan raya, irigasi dan lain-lain. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena pemerintah seperti disampaikan Menteri Ali Wardhana, tidak mungkin mengorbankan anggaran rutin pemerintah seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pensiunan, dan pembayaran hutang luar negeri.¹²

Lahirnya kebijakan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keuangan negara saja, namun berdampak terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor swasta. Kebijakan tersebut mendapatkan penolakan dari beberapa pengusaha nasional. Sebagaimana disampaikan wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) H. Probosutedjo, devaluasi tidak dapat dilakukan karena pemerintah tidak

¹⁰ *Koran Surabaya Post*, Tahun XXXI No. 74, 30 Maret 1983, hlm. 1

¹¹ *Majalah Tempo*, No. 6, Th. XIII, 9 April 1983, hlm. 68

¹² *Koran Jawa Pos*, Tahun XXXIV No. 274, 31 Maret 1983, hlm. 4

memiliki persediaan dollar AS yang cukup. Hal tersebut disebabkan tingkat ekspor Indonesia masih kecil dan akibat dari naiknya harga BBM dalam negeri.¹³ Sektor lain yang mengalami kesulitan adalah pedagang di tingkat eceran. Sektortersebut mengalami kesulitan berat karena setelah devaluasi akan terjadi kenaikan harga, terutama harga barang-barang impor atau yang mempunyai komponen impor. Pada beberapa toko emas dan elektronik kenaikan harga mencapai rata-rata 30% seperti emas 22 karat yang semula Rp. 8.650,- tiap gram menjadi Rp. 11.000,- dan harga televisi JVC 20 inc dari Rp. 440.000,- menjadi Rp. 570.000,-. Dampak dari kenaikan tersebut adalah penurunan omset dari para pedagang karena sepiunya pengunjung. Sektor makanan juga mengalami kenaikan hingga 40%, seperti bawang putih, susu, kelapa dan lain-lain.¹⁴

Pemerintah juga mengeluarkan usaha lain untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam upaya mengatasi dampak resesi ekonomi, Bank Sentral telah menugaskan bank-bank pemerintah tertentu untuk menyediakan pembiayaan bagi program-program khusus, misalnya Bank Rakyat Indonesia diberi tugas untuk memenuhi kebutuhan kredit pertanian, Bank Pembangunan Indonesia diberi tugas memberikan kredit proyek-proyek pembangunan, sedang bank-bank lain juga diwajibkan untuk membiayai proyek dan usaha lainnya.¹⁵ Pada prinsipnya, yang diinginkan adalah terciptanya spesialisasi diantara bank-bank pemerintah dalam melayani bidang-bidang industri tertentu. Bank Indonesia menyediakan dana dengan

¹³ *Koran Surabaya Post*, Tahun XXXI No. 75, 31 Maret 1983, hlm. 1

¹⁴ *Koran Jawa Pos*, Tahun XXXIV No. 278, 4 Juni 1983, hlm. 2

¹⁵ Anne Both dan Peter McCawley, *op. cit.*, hlm. 60

tingkat bunga yang rendah bagi pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh bank-bank pemerintah kepada bidang-bidang yang mendapat prioritas. Selain itu, cara lain yang ditempuh untuk menyalurkan kredit ke bidang-bidang yang diutamakan adalah dengan jalan menentukan tingkat bunga pinjaman yang berbeda-beda bagi berbagai golongan peminjam. Demikian pula kebijakan plafon kredit ditentukan secara terperinci menurut macam kredit yang diberikan, sehingga menentukan pula arah pemberian kredit tersebut kepada masyarakat.

Akibat yang jelas dari penciptaan uang yang berlebih adalah inflasi, terutama untuk periode setelah 1966. Stabilitas harga merupakan sasaran utama dari kebijakan ekonomi pemerintah orde baru pada periode tersebut. Jumlah uang yang beredar ternyata selalu meningkat lebih cepat daripada tingkat kenaikan yang dapat menjamin stabilitas harga. Hal paling mendasar hingga timbulnya permasalahan terhadap pengendalian uang yang beredar adalah terdapat kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain yang melandasi perkembangan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan suatu sektor perekonomian seperti sektor pertanian yang hendak melakukan pembelian kebutuhan produksinya yang melebihi jumlah dana yang diterima oleh sektor tersebut, sehingga sektor perbankan akan membiayai defisit tersebut dengan jalan memberinya kredit. Jadi bank sentral memberikan kredit kepada pemerintah untuk membiayai defisit APBN dengan jalan mencetak uang baru.

Sumber-sumber penciptaan uang tersebut mencerminkan perubahan dalam tahap perkembangan perekonomian. Pada awal tahun 60-an, sektor perbankan pemerintah memegang peranan yang sangat penting sementara kebijakan moneter diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek besar dan kampanye pengembalian Irian Barat di tengah-tengah menurunnya penerimaan kas pemerintah. Setelah terjadi perubahan pemerintahan pada tahun 1966, kebijakan atas moneter ditandai dengan adanya usaha-usaha dan penyesuaian yang sulit sebagai reaksi terhadap kenaikan harga minyak pada tahun 1973.

Tabel 3
Perkembangan Pemberian Kredit Perbankan Nasional 1982-1983
(dalam milyar rupiah)

	1982	1983					
	Des	Maret	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.
1. Bank Indonesia	2.771	2.388	2.293	2.307	2.287	2.362	2.375
2. Bank Umum Neg.	8.031	8.854	9.062	9.195	9.374	9.549	9.593
3. Bank Swasta Nas.	1.197	1.354	1.403	1.391	1.483	1.532	1.543
4. BPD.	357	372	381	382	387	389	390
5. Bank-bank Asing	666	737	661	694	728	776	719
Jumlah	13.022	13.705	13.800	13.969	14.259	14.608	14.620
Kenaikan	5,2%	0,6%	1,2%	2,0%	2,4%	0,12%	

(sumber : Laporan mingguan Bank Indonesia, No. 1280, 17 Nov. 1983)

Pada tabel 3, pemberian kredit setelah diberlakukannya kebijakan 1 Juni 1983, atau dengan kata lain setelah pagunya dihapus, tampak tidak ada peningkatan secara mencolok. Peningkatan yang paling besar terjadi antara akhir Desember 1982 dan Maret 1983 yakni sebesar sebesar 5.2 %, tetapi setelah bulan Juni sampai bulan Oktober 1983, kenaikannya hanya antara 0,12 sampai 2,4 % .

Berbagai persoalan tersebut tentunya juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan perbankan nasional. Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan tentunya harus dibekali dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat bukan dalam posisi untuk mempersulit laju dan gerak perbankan, hendaknya difahami sebagai upaya untuk lebih memudahkan pergerakan perbankan dalam menjalankan usahanya di tengah himpitan resesi dunia yang juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

Mungkin tidak semua kalangan di dalam masyarakat dapat memandang industri perbankan secara komprehensif karena bagaimanapun harus disadari bahwa data-data yang dipercaya dan lengkap mengenai industri perbankan di Indonesia susah didapatkan. Perkembangan industri perbankan merupakan pencerminan perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan bisnis nasional. Perkembangan bank-bank pemerintah mencerminkan peningkatan kegiatan sektor pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara serta proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Fakta-fakta membuktikan bahwa jumlah dana yang disalurkan melalui bank-bank pemerintah sangat besar sehingga tidak mengherankan bila bank-bank pemerintah sangat mendominasi pemberian kredit-kredit yang pada suatu saat relatif murah dibandingkan dengan bunga kredit umumnya. Di pihak lain, perbankan swasta juga merasakan perkembangan bisnis ini dari segi absolut.

Situasi perbankan pada waktu itu telah menyebabkan Bank Indonesia menempuh kebijakan dengan menganjurkan bank-bank melakukan merger agar tercipta kelompok usaha yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan dapat

meningkatkan ketahanan bank-bank tersebut. Selain merger, bank-bank juga diberi berbagai rangsangan seperti pemberian izin membuka cabang baru, diperbolehkan mengajukan permohonan menjadi bank devisa, dan pemberian keringanan pajak. Contoh bank hasil merger terlihat pada tabel 4.

Tabel 4

Bank-bank Umum Swasta hasil merger 1972-1977

No	Bank Asal	Tahun Merger	Nama Bank Merger
1.	Sejahtera Bank Umum Bank Umum Niaga Indonesia Bank Umum Lampung	1972	Sejahtera Bank Umum
2.	Bank Niaga Bank Agung	1973	Bank Niaga
3.	Bank Antar Indonesia Bank Rakyat Sulawesi	1974	Marannu Bank
4.	Bank Dirgahayu Bank Surakarta	1975	Bank Agung Asia
5.	Bank Bumi Artha Bank Duta Nusantara	1976	Bank Bumi Artha Indonesia
6.	Bank Semarang Bank Taurus Kredit	1977	Tamaea Commercial Bank

(Sumber : Direktori Perbanas 1977)

Pada tanggal 1 Desember 1972, terjadi pembelian Bank Lampung oleh Sejahtera Bank Umum. Satu bulan sebelum pembelian tersebut, Bank Umum Niaga Indonesia juga bergabung dengan Sejahtera Bank Umum, sehingga modal Sejahtera Bank Umum menjadi Rp. 8.000.000,-. Hasilnya adalah modal Sejahtera Bank Umum menjadi 1 Milyar rupiah dan SBU berhasil menambah kantor cabangnya di Lampung dan Medan yang merupakan kantor pusat dari

kedua bank yang telah merger dengan Sejahtera Bank Umum, yaitu Bank Lampung dan Bank Umum Niaga Indonesia.¹⁶

Dalam proses rasionalisasi, Bank Indonesia memberikan suasana yang mendorong adanya merger. Kebijakan tersebut juga telah merangsang perkembangan sektor industri perbankan dan memberi kesempatan kepada mereka yang berkecimpung dalam sektor tersebut dengan melepaskan mereka dari keterkaitan dengan tokoh-tokoh politik. Kebijakan tersebut dianggap tepat karena berhasil menciptakan suasana yang memungkinkan sektor swasta tampil dengan citra yang lebih bersih. Aspek ini sering dilupakan orang, padahal sektor inilah yang menanggung beban terbesar dalam rangka rasionalisasi industri perbankan.

Kebijakan 1 Juni 1983 yang menjadi pembahasan pada bagian selanjutnya, secara umum merupakan kebijakan yang berupaya untuk memperkenankan bank-bank negara menentukan tingkat bunga deposito berjangka sendiri. Jumlah deposito pada kurun Mei hingga September 1983 sebesar Rp. 669.9 milyar atau 73% dari Rp 911.8 milyar mengalami kenaikan pada bulan Januari menjadi Rp. 1.581,7 milyar pada minggu keempat pada bulan September. Deposito tersebut jika diamati dari sudut jangka waktunya maka terlihat bahwa deposito berjangka waktu 24 bulan turun jumlahnya sedangkan yang berjangka waktu 12 bulan meningkat. Peningkatan jumlah deposito yang paling mencolok adalah deposito berjangka waktu 3 bulan, dari

¹⁶ *Majalah Tempo* 16 Desember 1972, hlm. 40

Rp. 8.1 milyar pada bulan Mei menjadi Rp 297.7 milyar pada bulan September tahun 1983. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Perkembangan Deposito Berjangka Bank-Bank Pemerintah

	24 bln	18 bln	12 bln	9 bln	6 bln	3 bln dan kurang dari 3 bln	Jumlah
Mei	835.6	-	41.2	-	26.9	8.1	911.8
Juni	763.2	-	111.9	-	119.3	129.6	1.124.0
Juli	726.4	-	217.9	-	142.8	200.0	1.287.1
Agustus	684.1	0,2	352.7	0,1	200.3	262.7	1.500.1
Sept. III	661.1	0,6	408.9	0,1	213.5	290.5	1.574.7
Sept. IV	655.8	0,7	417.0	0,1	210.4	297.7	1.581.7

(sumber : Laporan Mingguan Bank Indonesia, No. 1280, 17 November 1983, hlm. 27)

Pada mulanya diperkirakan bahwa penurunan jumlah deposito berjangka waktu 24 bulan karena adanya beberapa nasabah yang khawatir bila menaruh uangnya untuk jangka panjang adalah untuk menghindari kemungkinan diberlakukannya kebijakan moneter baru lainnya. Masyarakat yang menyimpan uangnya memindahkan depositonya dari jangka waktu 24 bulan ke yang berjangka waktu lebih pendek seperti 12 bulan atau 6 bulan. Satu minggu sebelum paket kebijakan 1 Juni 1983 diberlakukan, Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara mengumumkan kenaikan cukup tinggi atas suku bunga deposito berjangka mereka. Untuk deposito berjangka 6 bulan, kedua bank tersebut menawarkan bunga 16% per tahun. Peningkatan jumlah deposito berjangka waktu 3 bulan terjadi karena adanya dana-dana yang belum terpakai yang disebabkan oleh kegiatan usaha dan ekonomi sedang lesu dan adanya penawaran dari beberapa perbankan pemerintah seperti Bank

Bumi Daya dan Bank Dagang Negara.¹⁷ Dengan mendapat bunga antara 16-18 % setahun dari deposito itu maka ini dapat dikatakan sebagai penghasilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam suasana bisnis yang lesu dan kondisi ekonomi yang belum membaik.

C. Kebijakan 1 Juni 1983

Industri perbankan menyambut kebijakan 1 Juni 1983 sebagai sebuah langkah penyegaran bagi industri perbankan nasional. Pemerintah (Bank Indonesia) melihat bahwa perbankan nasional sedang mengarah ke suatu tingkat kematangan. Kebijakan tersebut berisi antara lain : (1) Menghilangkan pagu kredit (credit ceiling) sehingga terjadi persaingan antar bank dan mengurangi market share perbankan pemerintah, (2) memberikan izin kepada perbankan pemerintah untuk menentukan tingkat suku bunga deposito dan peminjaman sendiri.¹⁸ Hal tersebut dipandang sebagai langkah-langkah utama untuk mengarahkan industri perbankan ke arah yang lebih baik sehingga dapat berkembang.

Perkembangan industri perbankan di Indonesia tidak terpaku pada kebijakan pemerintah semata, tetapi lebih baik juga dilihat kekuatan-kekuatan yang terdapat di arena bisnis lainnya. Selain itu, harus juga dilihat kekuatan-kekuatan yang timbul dalam proses pendorongan industri perbankan ke tingkat yang lebih tinggi. Sektor perbankan swasta khususnya sejak lama bebas menentukan tingkat bunga deposito. Bank swasta relatif bebas

¹⁷ *Majalah Tempo*, No. 14, Th. XIII, 4 Juni 1983, hlm. 71

¹⁸ Aida Alisjabbana., *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia dalam setengah abad terakhir, Jilid 4* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 22

menentukan tingkat bunga kredit karena setiap bank swasta mempunyai kebijakan sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan biaya uang, hubungan dengan nasabah, tingkat kepercayaan, dan sebagainya.

Perbankan harus taat pada pagu yang ditentukan oleh bank Indonesia yang tingkatnya berbeda-beda antara satu bank dengan yang lainnya dan jika batas pagu tersebut dilanggar, maka bank yang bersangkutan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Pagu ini dikaitkan dengan suatu program stabilisasi pada bulan Januari 1983 saat diadakan *Annual Bankers Dinners*. Gubernur Bank Sentral Rahmad Saleh menentukan bahwa tingkat pagu tidak mengalami kenaikan yang berarti. Kebijakan itu oleh kalangan bisnis perbankan dilihat sebagai suatu penurunan. Masyarakat bisnis dan perbankan tetap berharap bahwa ketentuan ini berubah bila ekonomi internasional memperlihatkan perbaikan dan memberikan dampak positif kepada ekonomi nasional. Tingkat bunga bank-bank pemerintah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pada bulan Mei 1983, Gubernur Bank Indonesia yang baru Arifin Siregar, membebaskan penentuan tingkat bunga deposito untuk jangka waktu enam bulan atau lebih. Hal ini ditandai dengan munculnya iklan bank-bank negara yang berlomba menawarkan jasa depositonya untuk menarik dana masyarakat.¹⁹

Bank-bank negara terikat pada ketentuan Bank Sentral dalam hal pagu, namun pada umumnya pagu kredit yang mereka tawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pagu bank-bank swasta nasional. Sebaliknya, beberapa bank negara mengalami kemunduran dalam pengumpulan dana masyarakat,

¹⁹ *Majalah Tempo* 16 Desember 1972, hlm. 40.

lebih-lebih setelah deposito beberapa perusahaan negara yang jumlahnya cukup besar tidak lagi ditempatkan pada bank-bank negara, tetapi langsung ditempatkan di Bank Indonesia.

Kebijakan perbankan sebelumnya memperlihatkan bahwa seolah-olah kebijakan itu mengandung unsur unsur restriktif. Kondisi dan tingkat perkembangan industri perbankan masih membutuhkan suatu kebijakan yang bersifat restriksi. Pemerintah sebagai pemegang otoritas perbankan, dapat memberikan lebih banyak kesempatan dan kepercayaan kepada perbankan nasional untuk memperlihatkan kemampuan dan kebolehannya pada masa pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan serta berbagai gejolak ekonomi yang melanda Indonesia pada kurun 1982 hingga 1983 menjadi ujian bagi eksistensi industri perbankan. Pada saat yang sama, ternyata perbankan tidak mampu mempertahankan diri dari resesi sehingga diperlukan kebijakan baru yang lebih progressif. Kebijakan tersebut dikenal dengan paket kebijakan 1 Juni 1983 yang memberikan gerak dan keuntungan bagi sektor perbankan pemerintah.

Pada dasarnya, kebijakan 1 Juni 1983 memberikan kebebasan kepada industri perbankan untuk menentukan tingkat bunga deposito dan kredit. Bank-bank dengan kebijakan pemberian kreditnya berusaha untuk menarik dana dari masyarakat. Bank Sentral juga menentukan kredit likuiditas yang lebih tinggi daripada bunga deposito yang diiklankan oleh berbagai bank. Dengan demikian, kredit likuiditas akan lebih mahal daripada waktu sebelumnya.

Paket kebijakan 1 Juni 1983 umumnya mendapat dukungan dan dianggap sebagai sebuah bentuk kebijakan yang integral dan konsisten. Kalau diperhatikan lebih lanjut, paket kebijakan ini dapat digolongkan sebagai langkah pertama untuk menjadikan industri perbankan lebih progressif dibanding sebelumnya. Hal ini ditandai dengan bank-bank yang dikelola oleh negara diberi kebebasan untuk membuka cabang-cabang di luar negeri, seperti bank BNI 46 yang membuka cabang di Hongkong dan Bahrain. BBD membuka cabang di Singapura.²⁰ Sedangkan perbankan swasta mendapat kemudahan untuk membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan.

C.1. Struktur dan Tingkat Bunga.

Adanya paket kebijakan 1 Juni 1983, maka struktur dan tingkat bunga diserahkan kepada mekanisme pasar yang didasarkan pada permintaan dan penawaran. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan dikumpulkan oleh bank-bank negara, bank-bank swasta devisa, bank-bank swasta non devisa dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut laporan mingguan Bank Indonesia (19 Januari 1984) jumlah deposito berjangka pada masing-masing bank adalah sebagai berikut : Bank Umum Pemerintah Rp. 2,136.6 milyar, Bank Swasta Devisa Rp. 2,780.0 milyar, Bank Swasta non Devisa Rp.291.0 milyar, Bank-bank Asing Rp. 551.0 milyar. Kesulitan yang dialami oleh

²⁰J.E Panglaykim dan Pangestu, *op. cit.*, hlm. 100

lembaga-lembaga keuangan non bank untuk ikut bermain dalam lahan ini adalah dikarenakan mereka menarik depositor yang menjadi langganan mereka semata. Deposita ini merupakan unsur pasar yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank-bank umum. Sementara itu, obligasi yang dikeluarkan oleh bank-bank pembangunan dalam usahanya menarik depositor dengan bunga sekitar 15% kurang begitu mendapat perhatian.

Bank-bank negara memiliki kesempatan lebih besar untuk menarik depositor, tetapi harus disertai dengan perbaikan pelayanan dan efisiensi para manajernya, agar para depositor tidak lari ke bank-bank asing yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam arti kualitas, efisiensi, cepat dan prestise.

Para depositor terdiri atas berbagai lapisan masyarakat dan masyarakat bisnis khususnya. Masyarakat umum merupakan depositor yang terdiri atas para profesional, pegawai negeri, atau juga para pegawai swasta. Bila mereka melakukan penyimpanan maka biasanya dalam bentuk deposito berjangka (pendek, menengah, dan panjang, yang biasanya berjangka 2 tahun). Mereka dapat digolongkan sebagai depositor tetap. Bila depositor merasa tidak aman menyimpan uangnya dalam rupiah, mereka menukarnya dengan dollar sehingga stok dollar menipis dan terjadi inflasi seperti yang pernah terjadi sebelum 1 Juni 1983 hingga menyebabkan keluarnya kebijakan devaluasi rupiah 30 Maret 1983.

Hilangnya batas pagu sebenarnya telah memberikan keleluasaan tersendiri bagi para nasabah atau peminjam, tetapi sebenarnya semua hal tersebut juga masih tergantung pada kemampuan bank-bank dalam menarik dana-dana dari masyarakat umum yang tidak menggunakan dananya untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, perbankan dapat menahan dana-dana masyarakat yang disimpan diluar negeri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kemampuan perbankan nasional dalam mengelola keuangan masyarakat.²¹

C.2. Tantangan Perbankan Swasta

Perbanas dan perbankan negara telah membentuk suatu wadah yang memungkinkan para bankir swasta untuk meningkatkan kerjasama dalam suatu forum bersama yang mereka namakan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.²²

Persatuan bank-bank nasional (Perbanas) juga telah mengantisipasi keadaan pasca keluarnya paket kebijakan 1 Juni 1983, Perbanas membentuk sebuah tim yang terdiri dari lima bank swasta devisa dan lima bank non devisa lainnya. Tim ini dibentuk untuk mencegah timbulnya persaingan tingkat suku bunga antara sesama anggota Perbanas. Tim Perbanas memberikan pedoman kepada para bank swasta dalam penentuan tingkat bunga. Walaupun mungkin belum tercapai persetujuan sepenuhnya dalam penentuan tingkat bunga tetapi dapat diperkirakan bahwa tingkat bunga yang dipakai oleh bank-bank

²¹ *Koran Surabaya Post*, Tahun XXXI No. 144, 4 Juni 1983, hlm. 1

²² J.E Panglaykim dan Pangestu, *op. cit.*, hlm. 124

swasta nasional (devisa atau non devisa) lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank negara dan bank-bank asing, yakni 18 % per tahun.²³ Tingkat bunga ini dianggap layak karena umumnya bank-bank swasta menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding dengan suku bunga bank negara dan bank asing. Satu hal lagi yang penting ialah masalah kepatuhan dari para anggota Perbanas, karena tidak mustahil di antara bank-bank swasta ada yang ingin menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi semata-mata untuk dapat menarik dana masyarakat lebih banyak. Perbanas tidak dapat memberikan sanksi apapun terhadap anggotanya yang melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu rasa saling mengerti dan kesadaran antara satu bank dengan bank lainnya perlu ditingkatkan. Hanya dengan solidaritas, kerjasama, dan keinginan untuk menaati pedoman yang ada itulah organisasi Perbanas dapat lebih baik dan memperlihatkan kinerjanya dengan solid. Anggota yang acuh dan tidak dapat diajak bekerjasama dapat merusak rasa solidaritas dan wibawa persatuan perbankan swasta ini. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat bunga cenderung naik antara 15-20 % tergantung kepada bank-bank yang berusaha menarik para deposan, jangka waktu, dan kepercayaan yang diberikan kepada bank. Bila tingkat bunga naik, maka berarti biaya uang semua bank akan naik.²⁴

Dengan lahirnya kebijakan 1 Juni 1983 pelaku perbankan mengalami perubahan. Para penguasa di bidang moneter (Bank

²³ *Majalah Tempo*, No. 16, Th. XIII, 18 Juni 1983, hlm. 65

²⁴ J.E Panglaykim dan Pangestu, *op. cit.*, hlm. 131

Indonesia dan Departemen Keuangan) menyadari bahwa industri perbankan nasional telah berhasil menjadi salah satu institusi yang berhasil mengatasi devaluasi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memajukan industri perbankan Indonesia. Lebih penting dari itu adalah sebagai langkah pada penciptaan sarana untuk menjadikan industri perbankan negeri ini menjadi industri perbankan yang lebih baik.

C.3. Kebijakan Pelengkap Liberalisasi Perbankan 1 Juni 1983

Sambutan Gubernur Bank Indonesia Arifin Siregar pada *Banker's Dinners* 16 Januari 1984, mengandung beberapa petunjuk dan kebijakan di bidang Perbankan 1 Juni 1983. Dalam sambutannya, Gubernur mengetengahkan perkembangan perekonomian nasional yang dinilainya mulai membaik bila dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada pertengahan tahun 1981 hingga triwulan pertama tahun 1983.

Bank-bank berusaha untuk meningkatkan kesehatan dan manajemennya, serta terus memperluas jaringannya dalam bentuk pembuatan cabang. Sampai dengan akhir bulan Desember 1983, ternyata 63 bank umum swasta nasional sebagai bank sehat, 23 bank pembangunan daerah yang tergolong sehat. Bank-bank negara membuka 20 cabang baru, bank swasta 24 dan bank pembangunan 5, sehingga terdapat lebih kurang 1.429 kantor dan cabang bank.²⁵

²⁵Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/KMK.011/1984, 24 Januari 1984.

Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah pelengkap kebijakan 1 Juni 1983 dengan menyediakan fasilitas diskonto dan juga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Ketentuan likuiditas minimal 15 % tetap berlaku.²⁶ Ada dua jenis fasilitas diskonto yaitu : (a) fasilitas diskonto yang tersedia untuk memperlancar pengaturan dana rutin (masalah likuiditas perbankan), (b) fasilitas diskonto yang tersedia untuk memudahkan bank-bank dalam penanggulangan kesulitan bila rencana pengarahannya tidak sesuai dengan rencana realisasi kredit jangka menengah dan panjang. Jangka waktu yang menentukan dua fasilitas tersebut ialah maksimal empat minggu dan dua bulan. Tingkat bunganya ditentukan rata-rata sama seperti deposito berjangka waktu 1,3 dan 6 bulan. Dengan adanya fasilitas diskonto, tingkat *inter bank rate* akan dapat diatur lebih baik sehingga kenaikan bunga sampai 30% pada akhir 1983 dapat cegah.²⁷

Kebijakan pemerintah sebagai pelengkap di bidang perbankan ini terlihat sederhana, sebab kedua fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pelengkap kebijakan 1 Juni 1983 lebih bersifat pengendalian secara tidak langsung. Di samping itu ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan tersebut secara teori moneter memiliki kemudahan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Kebijakan diskonto dan SBI pada gilirannya merupakan tantangan bagi bank-bank dalam upaya untuk menarik dana dari masyarakat.

²⁶ Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, No. SE.16/8/UPUM, 21 Januari 1984.

²⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Kebijakan Moneter Orde Baru*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 93

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN JUNI 1983 :

KASUS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

A. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan pada tahun 1961 dengan akta notaris Anwar Maha Judin No. 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan bertindak selaku pendiri adalah Soewondo Ranuwidjojo sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kolonel Surachman sebagai Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya.¹

Pada tahun 1962 dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah harus didirikan dengan peraturan daerah. Atas dasar undang-undang tersebut dan undang-undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967, ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 1976, tanggal 10 Juli 1976 yang isinya antara lain pengalihan perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memiliki fungsi dan tugas :

- a. memberi kredit jangka pendek, menengah, dan panjang kepada pemerintah daerah, perusahaan daerah dan swasta, perorangan dalam bentuk kredit KIK/KMKP, Keppres 14A/80, Investasi Umum, Eksploitasi Umum,

¹ *Company Profile Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur* (Surabaya, Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 2000), hlm. 5

Kelayakan dan kredit lainnya yang dapat membantu masyarakat Propinsi Jawa Timur.

- b. Sebagai pemegang kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur.
- c. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
- d. Mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan.
- e. Melaksanakan jasa perbankan lainnya seperti pengiriman uang, inskasso, penerbitan bank garansi.

Mengenai pemilikan modal BPD Jatim sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 14 tahun 1980 yang isinya antara lain mengubah modal dasar Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Rp. 1 Milyar menjadi Rp. 5 milyar untuk mendukung operasional perusahaan, yang meliputi :

1. Dana pemerintah Daerah, yaitu dana-dana yang bersumber dari kas Pemerintah Daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Dana-dana tersebut merupakan dana jangka pendek yang tidak dapat dipakai sebagai dana perkreditan.²
2. Dana Masyarakat, yang dihimpun oleh pihak bank dan difungsikan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bank garansi yang berupa uang yang diblokir, dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur jangka pendek.

² Dasar penggunaan kas daerah sebagai modal bank pembangunan daerah adalah Undang-Undang No. 5 th. 1974 tentang Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979.

3. Dana Pinjaman, yaitu dana-dana yang berasal dari pinjaman likuiditas Bank Indonesia dan pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya

Sesuai dengan fungsi utama sebagai bank pembangunan, BPD Jatim selain bertugas selaku pemegang kas daerah, operasional Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur lebih banyak diarahkan pada usaha-usaha untuk menunjang program Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang terdiri atas berbagai proyek pembangunan daerah pada berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pengangkutan, pertanian, jasa, dan lain-lain. Hal tersebut ditujukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah, sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan pendapatan golongan ekonomi lemah masyarakat Jawa Timur.

Sesuai dengan fungsi bank Pembangunan, maka kegiatan operasional kredit juga dilakukan secara bertahap dengan lebih banyak diarahkan pada pemberian kredit jangka menengah dan panjang. Adapun beberapa macam kredit yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di antaranya, pemberian kredit investasi jangka menengah dan panjang, kredit modal kerja, dan lainnya.

Adapun sasaran kredit adalah sektor-sektor ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah baik untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baru maupun melanjutkan proyek-proyek yang telah berjalan sebelumnya. Pembinaan dan usaha pengembangan perusahaan golongan ekonomi lemah tidak terbatas pada bantuan pemberian kredit. Pada

aspek tertentu guna mengatasi kesulitan permodalan pengusaha, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menempatkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan.³

Pada bidang operasional perkreditan, kegiatan lain yang dilaksanakan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur antara lain penerbitan bank garansi yang difungsikan untuk membantu para nasabah dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan tender proyek-proyek pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keppres 14A/80. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur juga melaksanakan jasa transfer antar bank untuk membantu percepatan peredaran keuangan masyarakat, baik di internal Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur maupun dengan Bank Pembangunan Daerah di propinsi lainnya.

B. Aktivitas BPD Jawa Timur Periode 1982-1983

Selama periode 1982-1983, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut nampak dari kenaikan jumlah pemasukan yang bersumber dari dana masyarakat, pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dan lainnya. Periode 1982-1983 yang merupakan masa-masa sulit bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak berpengaruh terhadap perkembangan pemasukan pendanaan bagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pada periode 1982-1983, jumlah sumber pendanaan bagi BPD Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.895.534.000,- atau 9,78 % dari jumlah sebelumnya sebesar

³ Dasar penyertaan modal adalah UU Pokok Perbankan No. 14 th. 1967 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/12/UPK, tanggal 14 Februari 1980.

Rp. 29.619.914.000,- meningkat menjadi Rp. 32.515.448.000 pada tahun 1982-1984.

B.1. Perkreditan

Salah satu ukuran kinerja keberhasilan BPD Jatim adalah keberhasilan dan penyerapan kredit yang dikeluarkan oleh BPD Jatim kepada masyarakat. Total nilai kredit yang berhasil disalurkan oleh BPD Jatim pada Periode 1982-1983 adalah sebesar Rp. 18.875.311.745,-. Bila dibandingkan dengan realisasi kredit yang berhasil disalurkan oleh BPD Jatim pada periode 1981-1982, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp. 6.141.787.745,- atau 48,23 % dari jumlah sebelumnya sebesar Rp. 12.733.524.000,-. Dalam perwujudannya, pengarahannya operasional perkreditan lebih banyak diarahkan pada kredit untuk Keppres 14A/80, yang menempati urutan teratas dari penyaluran kredit yaitu sebesar Rp. 7.577.365.000,-⁴

Saldo pinjaman yang diberikan oleh BPD Jatim per Maret 1983 terbagi dalam beberapa sektor seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6
Perkembangan Posisi Debitur menurut sektor Ekonomi Maret 1983

No	Sektor Kredit	Jumlah
1.	Pertanian dan Perkebunan	Rp. 1.431.391.000
2.	Perindustrian	Rp. 1.704.037.000
3.	Konstruksi dan Jasa	Rp. 4.781.702.000
4.	Perdagangan	Rp. 7.109.502.000
5.	Pengangkutan	Rp. 2.191.541.000
6.	Lain-lain	Rp. 2.601.208.000
Total		Rp. 19.819.381.000

(sumber: Arsip BPD Jatim, 1983, Hlm. 28)

⁴ *Arsip BPD Jatim, 1983, hlm. 24*

Posisi pinjaman yang diberikan per Maret 1983 sebesar Rp. 19.819.381.000,- tersebut diberikan dalam beberapa jenis kredit yaitu : Kredit Umum, KIK, Kredit Keppres 14/A 80, Kredit Kelayakan, Kredit Guru, dan Kredit Pensiunan. Dalam kaitannya dengan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai bank pembangunan, upaya untuk peningkatan fungsi tersebut tercermin dari adanya pengarahannya pinjaman yang diberikan yaitu mengarah pada pemberian kredit jangka menengah dan panjang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7

Perkembangan Posisi Debitur menurut jangka waktu 1982-1983

Jangka waktu	Maret 1982	Maret 1983
Menengah/panjang	Rp. 8.822.663.000	Rp. 12.678.280.000
Pendek	Rp. 5.319.887.000	Rp. 7.141.101.000

(sumber : Arsip BPD Jatim, 1983, Hlm 39)

B.2. Bank Garansi, Tranfer, Inkaso dan Kegiatan Lainnya

Dalam pelaksanaan operasional bank serta untuk mendukung program peningkatan perekonomian masyarakat serta menumbuhkan jasa usaha lainnya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan aktivitas jasa perbankan. Diantaranya adalah penerbitan jaminan bank (bank garansi). Adapun bentuk jaminan bank yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah jaminan bank yang dilaksanakan sendiri oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Perum Jasa Raharja. Sebagai

gambaran atas perkembangan penerbitan jaminan bank garansi terlihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Perkembangan Penerbitan Jaminan Bank Tahun 1982-1984
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Rp
1982/1983	20.703.570
1983/1984	17.015.636

(Sumber : *Arsip BPD Jatim, 1984, hlm. 39*)

Dalam sejarah perkembangan usaha penerbitan Jaminan Bank dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 1983/1984, jumlah jaminan bank yang berhasil diterbitkan hanya berjumlah Rp. 17.015.636.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3.687.934.000, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 1982/1983.

Tabel 9
Perkembangan Kegiatan Transfer Masuk dan Keluar Tahun 1982 - 1984
(dalam ribuan rupiah)

Transfer	Tahun	PUS	PUT	Jumlah
	Masuk	1982/1983	1.955.328	129.755.510
	1983/1984	9.813.708	214.484.952	224.298.660
Transfer	Tahun	PUS	PUT	Jumlah
	Keluar	1982/1983	2.541.251	121.048.359
	1983/1984	2.774.163	260.120.512	262.894.675

(Sumber : *Arsip BPD Jawa Timur, 1984, hlm. 41*)

Usaha lain BPD Jatim adalah pengiriman uang (transfer). Usaha ini bukanlah usaha pokok BPD JATIM, namun cukup membantu

mempercepat peredaran uang nasabah maupun masyarakat umum, serta dapat membantu meningkatkan pendapatan BPD JATIM. Dengan meningkatnya usaha ini, secara tidak langsung telah menjadi tolok ukur atas meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Penggunaan jasa transfer melalui BPD JATIM baik transfer keluar maupun transfer masuk seperti terlihat pada tabel 9.

Dari sekian jenis pendapatan yang menunjang jumlah laba usaha Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, salah satu diantaranya adalah adalah pendapatan Inkaso. Selama tahun anggaran 1983/1984, jumlah pendapatan yang diperoleh melalui inkaso adalah sebesar Rp. 7.679.969.770,- bila dibandingkan dengan pendapatan provisi pada tahun anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 4.460.626.230,- telah terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.219.343.230 atau 72,12 %.⁵

Selain kegiatan tersebut di atas, sesuai dengan landasan Undang-Undang No. 5/1974 dan peraturan Mendagri No.1/1979, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bertugas sebagai pemegang kas daerah, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Pada akhir Maret 1984, terdapat 16 kabupaten/kota dan 1 Propinsi Jawa Timur yang telah mempercayakan pengelolaan kas daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Adapun jumlah keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selama tahun anggaran 1983/1984 mencapai

⁵ *Arsip Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur* (Surabaya: Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 1984), hlm. 41

Rp.543.367.579.000,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.048.079.000,- atau 10,59 % jika dibanding dengan tahun anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 491.319.500,-. Walaupun belum semua pemerintah kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan kas daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, hal tersebut lebih banyak dikarenakan belum semua daerah terdapat kantor cabang BPD Jatim. Jumlah kantor cabang BPD Jatim sampai Maret 1984, berjumlah 12 kantor cabang BPD Jatim, yang terdapat di 5 Pemerintah Kota dan 11 Pemerintah Kabupaten yang menyerahkan pengelolaan kas daerah kepada BPD JATIM, sehingga total keuangan pemerintah kabupaten/kota yang dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur hingga akhir maret 1984 mencapai Rp. 160.534.898.964,12 berarti telah terjadi peningkatan sebesar 17,12 % atau Rp. 23.472.459.353,26 bila dibandingkan dengan akhir maret 1983 yang berjumlah Rp. 137.062.439.610,87.⁶

C. BPD Jawa Timur Pascakebijakan Juni 1983 hingga 1984.

Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bersumber dari modal yang dihimpun sendiri, pinjaman dari Bank Indonesia, Dana Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Selama tahun anggaran 1983/1984, jumlah dana yang berhasil dihimpun hingga akhir Maret 1984 mencapai Rp. 40.926.821.000,-. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah dana

⁶*Arsip BPD Jawa Timur 1984, op. cit., hlm. 45*

yang berhasil dihimpun pada akhir Maret 1983 hanya sebesar Rp. 32.507.849.000,- maka terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 8.418.972.000,- atau 25.09 %, sedang dana yang berhasil dihimpun pada tahun 1981/1982 adalah sebesar Rp. 29.619.914,- atau hanya mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.895.534.000,- atau 9,7 % jika dibandingkan dengan tahun 1982/1984.

Sebagai gambaran perkembangan dana selama kurun waktu 1980/1981 hingga tahun 1983/1984, dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10

Perkembangan Sumber Dana BPD JATIM Maret 1981-1984 (dalam ribuan Rp)

Sumber Dana	Maret 81	Maret 82	Maret 83	Maret 84
Modal :				
Modal tersetor	1.241.003	3.319.003	3.712.003	4.087.003
Cadangan Umum	157.611	291.440	458.856	682.922
Jumlah	1.398.614	3.610.443	4.170.859	4.769.935
Dana Masyarakat :				
Giro Umum	3.963.118	6.839.352	8.704.235	11.448.551
Tabungan	306.060	623.870	899.942	1.010.891
Deposito	170.997	2.092.712	4.133.662	7.226.780
Jumlah Dana Masy.	4.440.175	9.555.934	13.737.839	19.686.222
Dana Pinjaman :				
Dana Cofin BAPINDO	825.133	531.302	320.442	184.099
Pinj.Likw. B.I.	1.684.110	6.396.192	9.411.280	8.159.213
Pinjaman Lainnya.	400.000	400.000	400.000	400.000
Dana Cofin PT. Uppindo	-	31.197	24.851	156.099
Jumlah Dana Pinjaman	2.909.243	7.358.691	10.156.573	8.899.411
Dana Pemda Tk.I dan II	19.661.826	9.094.846	4.450.177	7.571.253
Jumlah Dana	28.409.858	29.619.914	32.515.448	40.926.821

(Sumber : Arsip BPD Jatim, 1984, hlm. 15)

Data tabel di atas memperlihatkan terjadi peningkatan sumber pendanaan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran 1983/1984. Pada dua periode tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 1980/1981, kemudian tahun anggaran 1981/1982 dan 1982/1983, hanya terjadi peningkatan jumlah dana rata-rata tiap tahun sebesar 2,0 %. Pada tahun anggaran 1983/1984, terjadi peningkatan jumlah dana yang dihimpun hingga 25,09 %. Peningkatan ini terlihat cukup besar pada sektor dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dibagi dalam 3 (tiga) bidang, yaitu giro umum, tabungan, dan deposito. Dana yang bersumber dari giro umum, telah mencapai peningkatan hingga mencapai 31,53 %, yang mana pada tahun anggaran sebelumnya peningkatan hanya mencapai 27,27 %. Dana yang bersumber dari tabungan mencapai peningkatan hingga 12,33 % atau sebesar Rp. 1.010.891.000,- dari total dana pada akhir Maret 1983 sebesar Rp. 899.942.000,- menjadi Rp. 1.110.919.000,- pada akhir Maret 1984. Sumber dana yang berasal dari deposito mengalami peningkatan hingga 74,83 % atau sebesar Rp. 4.133.662.000,- dari posisi semula di akhir Maret 1983 sebesar Rp. 3.093.118.000,- menjadi Rp. 7.226.780.000,- di akhir Maret 1984.

Tujuan dan fungsi bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku salah satu penunjang pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Timur, maka gerak operasional perkreditan yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tetap mendukung dan berupaya untuk mengembangkan daerah. Realisasi operasional perkreditan lebih banyak diarahkan kepada kelompok ekonomi masyarakat lemah dengan memprioritaskan kepada sektor-

sektor ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Dalam kaitannya dengan fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku bank pembangunan, terhadap pemberian kredit tersebut secara bertahap diarahkan kepada pemberian kredit dalam jangka menengah dan panjang. Seperti terlihat pada tabel 11.

Tabel 11

Perbandingan Rencana dan Realisasi Kredit Tahun Anggaran 1983/1984

No	Jenis Kredit	Perencanaan	Realisasi
1.	Kredit Investasi Umum	Rp. 3.343.470.000	Rp. 2.142.424.000
2.	Kredit Kelayakan	Rp. 1.145.680.000	Rp. 1.064.402.000
3.	KIK	Rp. 4.185.374.000	Rp. 1.129.271.000
4.	KMKP Umum	Rp. 4.266.151.000	Rp. 5.698.534.000
5.	KMKP	Rp. 3.691.038.000	Rp. 2.943.537.000
6.	Kredit Keppres 14A/80	Rp. 6.358.844.000	Rp. 2.828.306.000
7.	Kredit Lain	Rp. 2.495.765.000	Rp. 198.237.000
Total		Rp. 25.795.322.000	Rp. 16.004.711.000

(sumber: *Arsip BPD Jawa Timur 1984*, hlm 23)

Dari rencana tersebut, realisasi kredit yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 16.004.711.000,- atau 62,04 %. Jika dibandingkan dengan realisasi kredit selama tahun anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 18.875.311.745,- terjadi penurunan sebesar Rp. 2.870.000,- atau 15,21 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kepentingan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penggunaan kredit keppres 14/A 80. Beberapa hal lain yang menjadi penyebab menurunnya angka kredit pada tahun anggaran 1983/1984, adalah kecenderungan bank yang masih berhati-hati dalam penyaluran kredit sebagai langkah penyesuaian atas lahirnya kebijakan 1 Juni 1983, di samping

masih sepiunya pasar dan daya beli masyarakat akibat dari lesunya perekonomian nasional

D. Dampak Kebijakan Juni 1983 terhadap BPD Jawa Timur.

Kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983, merupakan kebijakan perbankan yang lebih di tujukan kepada perbankan pemerintah. Tujuannya untuk lebih meningkatkan dunia perbankan dan juga memberikan keleluasaan gerak dari perbankan negara, maka pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan perbankan pada 1 Juni 1983, yaitu menghapuskan pagu bunga baik pada deposito maupun kredit. Diharapkan dengan kebijakan ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada bidang perbankan.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai salah satu perbankan negara yang bergerak pada pembangunan khususnya ditingkat lokal Propinsi Jawa Timur, berusaha menyesuaikan dengan adanya kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan liberalisasi perbankan adalah :

- a. Sumber dana yang diperoleh BPD Jatim pada akhir Maret 1983 mencapai jumlah sebesar Rp. 32.507.450.000,- sedang pada akhir Maret 1984 tercatat sebesar Rp. 40.926.821.000,-. Hal tersebut berarti telah terjadi peningkatan sebesar 25,90 % atau Rp. 8.148.972.000,-. Jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp. 40.926.821.000,- pada akhir periode 1979-1984 kalau dibandingkan dengan posisi sumber dana pada akhir periode 1974-

1979 sebesar Rp. 6.837.700.000,- maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 34.089.121.000,- atau 498,55 %.⁷

- b. Pinjaman yang diberikan pada tahun anggaran 1983/1984, dalam bentuk kredit yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 16.00.711.000,- atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi kredit pada tahun anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 18.875.311.745,-. Terjadi penurunan sebesar Rp. 2.870.000.000,- atau 15.21 %. Penurunan tersebut disebabkan karena pelaksanaan kredit lebih banyak diberikan pada kredit menengah yang ditujukan pada golongan pengusaha menengah. Realisasi kredit selama periode 1974-1979 mencapai jumlah Rp. 4.306.808.000,- dan realisasi kredit selama periode 1979-1984 mencapai jumlah sebesar Rp. 58.380.762.000,-. Hal itu menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi mencapai sebesar Rp. 54.073.954.000,- atau sebesar 1255,55 %.⁸

Ulasan dan data yang dipaparkan diatas memberikan sebuah kondisi perbankan lokal yang berpusat di daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berusaha untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selama periode 1979-1984 terjadi fluktuasi pendapatan serta pengeluaran, namun secara umum tidak didapatkan keadaan yang memburuk terhadap perjalanan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Hingga akhir tahun semester 1 tahun 1984, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mampu menyesuaikan pendapatannya hingga memperoleh pendapatan yang cukup besar bila dibanding dengan periode 1974-1979. Dampak yang

⁷ *ibid*, hlm. 10

⁸ *ibid*

terasa dengan lahirnya kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 tidak memberikan hasil yang cukup signifikan, jika dilihat dari hasil yang diraih setelah setahun masa anggaran pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut, namun selama periode 1961 hingga 1984, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup baik. Prospek perkembangan ekonomi masyarakat Propinsi Jawa Timur terus menjanjikan pertumbuhan yang signifikan, dan tidak terpengaruh akibat munculnya resesi dunia yang diakibatkan salah satunya oleh turunnya harga minyak dunia. Hal tersebut terlihat dari total pendapatan BPD Jatim selama tahun anggaran 1983-1984 atau pasca lahirnya kebijakan paket Juni 1983 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dampak yang berbeda terlihat pada angka penyaluran kredit, dimana telah terjadi penurunan, walaupun tidak terlalu banyak. Kesemua hal tersebut, merupakan gambaran nyata atas perjalanan BPD Jatim selama masa krisis ekonomi tahun 1983, yang disusul kemudian dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan baru bagi dunia perbankan nasional, khususnya bagi perbankan milik negara. BPD Jatim sebagai salah satu bank milik negara tentunya terpengaruh langsung atas lahirnya kebijakan tersebut, dan selama periode tersebut BPD Jatim mampu melalui proses kebijakan tersebut dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN

Ketika negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selama periode sebelum tahun 1980-an yang ditunjang oleh faktor produksi yang baik dari migas, krisis ekonomi merupakan hal yang tidak mungkin. Indonesia sebagai negara yang mengedepankan peningkatan sektor ekonomi pertanian (berbasis agraris) yang ditunjang oleh sektor industri ternyata mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Ketergantungan pada faktor produksi dan ekspor migas serta turunnya harga minyak telah membawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi yang tidak mengedepankan pemerataan dan menumbuhkan sektor ekonomi lain turut memperparah kondisi ekonomi Indonesia.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6-7 % selama periode 1967 hingga 1980-an. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dimana Indonesia pada tahun 1982 telah masuk pada negara berpenghasilan menengah dengan pendapatan per kapita 520 dollar AS per tahun. Pada tahun 1979 penghasilan rata-rata per kapita Indonesia masih 379 dollar AS dan meningkat 420 dollar AS pada tahun 1980 dan jika dihitung semenjak tahun 1969 hingga 1980 pendapatan per kapita di Indonesia telah meningkat rata-rata 7,8 % per tahun. Model pertumbuhan yang berorientasi pada peningkatan PNB, telah menimbulkan ketidakadilan pembagian pendapatan dan pada tahap selanjutnya menyebabkan timbulnya pengangguran.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1980-an memaksa Indonesia untuk melakukan beberapa kebijakan pada beberapa sektor, khususnya bidang moneter dan keuangan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar AS yang mencapai 38%. Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan ekspor serta mengurangi defisit devisa negara akibat dari meningkatnya impor dan menurunnya ekspor. Defisit tersebut disebabkan salah satunya oleh turunnya harga minyak dunia dari US\$ 34 menjadi US\$ 29 tiap barrel, dimana pendapatan negara dari ekspor minyak mencapai 70%. Dengan lahirnya kebijakan devaluasi, defisit pemerintah yang mencapai 4 milyar dollar AS dapat berkurang. Penerimaan Indonesia dari ekspor minyak dapat meningkat Rp. 29.000,- dari pendapatan sebelumnya Rp. 20.000,- tiap barrel, walaupun penerimaan dalam dollar AS tetap US\$ 29 per barrel. Kebijakan devaluasi tidak dapat dilihat dari sisi positif penerimaan pemerintah saja, namun cukup berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Harga-harga barang di pasaran meningkat dan mengganggu perekonomian khususnya masyarakat yang bekerja di sektor swasta. Sektor makanan mengalami kenaikan hingga 40%. Beberapa barang sekunder lain seperti emas juga mengalami kenaikan yang mencapai rata-rata 30 %.

Kebijakan lain yang diambil dalam bidang moneter dan keuangan lain adalah liberalisasi perbankan pada 1 Juni 1983. Kebijakan tersebut lebih ditujukan terhadap perbankan milik pemerintah, yaitu penghapusan pagu kredit dan kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunga baik dalam pinjaman maupun simpanan. Kebijakan moneter juga diarahkan untuk menunjang dan memberi

prioritas kepada usaha-usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan untuk menghindari atau mengurangi tekanan inflasi sebagaimana yang telah mendera Indonesia pada masa 60-an hingga mencapai tingkat inflasi 600%. Untuk mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun dalam kurun 1979-1984, dibutuhkan investasi sebesar rata-rata 24% dari produksi nasional, sedangkan untuk membangun berdasarkan kemampuan sendiri diperkirakan sekitar 79% dari dana tersebut harus dikerahkan dari sumber-sumber dalam negeri yaitu tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat.

Pembentukan tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan merupakan salah satu komponen yang besar. Pembentukan tabungan masyarakat dapat berbentuk tabanas, deposito berjangka dan lainnya. Dengan pemberian bunga yang cukup menarik serta adanya lembaga keuangan yang dipercaya dan nilai mata uang yang stabil merupakan salah satu faktor pendorong untuk menabung atau juga mengambil kredit.

Kebijakan liberalisasi perbankan juga berpengaruh terhadap perbankan pemerintah di tingkat lokal yaitu bank pembangunan daerah. Kantor pusat bank pembangunan daerah terletak di masing-masing ibukota propinsi. Tuntutan situasi perekonomian di satu pihak dan tuntutan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di pihak lain telah membawa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk bertindak lebih dewasa dan berjuang lebih keras lagi. Lahirnya kebijakan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 juga memiliki dampak yang cukup nyata terhadap bank tersebut. Dampak yang terlihat adalah hasil positif dari laju pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mengalami kenaikan

sumber pendanaan hingga sebesar 25,90 % sejak Maret 1983 hingga maret 1984. Pendanaan tersebut didapatkan dari kas pemerintah, swasta, baik perorangan maupun perseroan baik itu dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Demikian juga realisasi kredit selama tahun anggaran 1983/1984 telah mencapai 16.004.711.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi kredit selama periode 1974-1979 yang sebesar Rp. 4.306.808.000,- maka realisasi kredit yang diperoleh selama periode 1979-1984 mengalami peningkatan hingga 1255,55 %. Angka kredit tersebut digunakan pada kredit jangka pendek dan jangka menengah seperti kredit inventaris umum, kredit kelayakan, kredit keppres 14/A 80 dan kredit lainnya. Hal tersebut memberikan gambaran mengenai peran dan posisi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terhadap kebijakan pemerintah yang disebut dengan liberalisasi perbankan 1 Juni 1983. Pencapaian oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selama periode 1979-1984 khususnya pada tahun anggaran 1983/1984 merupakan sebuah tantangan bagi pertumbuhan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada periode pembangunan berikutnya (1984-1989).

DAFTAR PUSTAKA

A. ARSIP DAN LAPORAN PEMERINTAH

- Arsip Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 1982/1983*, Surabaya: Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 1983
- Arsip Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 1983/1984*, Surabaya: Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 1984
- Bank Indonesia, Indonesia Financial Statistic*, Mei 1980
- Company Profile Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*, Surabaya: Bagian Perencanaan dan Sumberdaya Manusia BPD Jatim, 2000.
- Data Perbankan Jawa Timur*, Surabaya, Kordinator Bank Indonesia Jawa Timur, 1985
- Jurnal Ekonomi dan Industri, Jakarta*, 3 Desember 1982
- Laporan tahunan Bank Indonesia*, Jakarta. 1978
- Laporan Mingguan Bank Indonesia*, No 1280, 17 Nov 1983
- Laporan Mingguan Bank Indonesia*, No. 30, 19 Januari 1984
- Laporan Pembangunan Bank Dunia*, Terjemahan Pandan Guritno, Jakarta, UI.Press, 1983
- Peraturan Menteri Dalam Negeri*, No.1, 1979
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur*, No.2, 1976
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur*, No. 14, 1980
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia*, No. 49/KMK.011/1984, 24 Januari 1984
- Surat Edaran Bank Indonesia*, No. 12/12/UPK, tanggal 14 Februari 1980
- Surat Edaran Bank Indonesia*, No. SE.16/1/UKU, 1983
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia*, No. SE.16/8/UPUM, 21 Januari 1984

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia, No. 16/2/UPUM, 1 Juni 1983

Undang-undang No. 14 th. 1967 tentang Pokok Perbankan

Undang-undang No. 5 th. 1974 tentang Bank Pembangunan Daerah

B. Buku dan Karya Ilmiah lainnya

Both, Anne. dan McCawley, Peter. *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1987

Aida Alisjahbana, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia dalam setengah abad terakhir, Jilid 4*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005

Dumairy dan Zahrul Hadiprabowo, *Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ananda, 1983

Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXX, No. 4, Desember 1982

Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXI, No.2, Juni 1983

Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXII, No.1, Maret 1984

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid II, Jakarta: PT. Cipta Adikarya, 1990

Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank, dan Lembaga-lembaga Keuangan*, edisi pertama, Yogyakarta: BPFE, 1991

Hill, Hal. *Transformasi Ekonomi Indonesia sejak 1966*, Yogyakarta: PAU UGM-PT-Tiara Wacana, 1966

J.E.Panglaykim dan Pangestu, *Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

Komarudin, *Ensiklopedi Manajemen, edisi kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosutanto, Jakarta: UI-Press, 1986

Magdalena Lumbatoruan dan B. Soewartoyo, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, Jilid II*, Jakarta: PT. Cipta Adi Karya, 1994

Muchdarsyah Sinungan, *Kebijakan Moneter Orde Baru*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Suharsono Sagir, *Ekonomi Indonesia Menghadapi PELITA IV*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983

Soeharsono Sagir, *Masalah Ekonomi Indonesia 82*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1982

Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991

Lee, S.Y. dan Jao, Y.C., *Struktur keuangan dan Kebijakan Moneter di Asia Tenggara*, Jakarta: Bina Aksara, 1981

C. SURAT KABAR DAN MAJALAH

Koran Jawa Pos, Tahun XXXIV, No. 274, 31 Maret 1983

Koran Jawa Pos, Tahun XXXI, No. 278, 4 Juni 1983

Koran Surabaya Post, Tahun XXXI, No. 74, 30 Maret 1983

Koran Surabaya Post, Tahun XXXI, No. 75, 31 Maret 1983

Koran Surabaya Post, Tahun XXXI, No. 144, 4 Juni 1983

Laporan khusus majalah Prisma Tahun XII, No. 7, Juli 1983

Harian Kompas, edisi 4 Agustus 1981

Majalah Tempo, 16 Desember 1972

Majalah Tempo, No.6, Tahun XIII, 9 April 1983

Majalah Tempo, No.10, Tahun XIII, 7 Mei 1983

Majalah Tempo, No.14, Tahun XIII, 4 Juni 1983

Majalah Tempo, No.16, Tahun XIII, 18 Juni 1983

EKONOMI

BANK

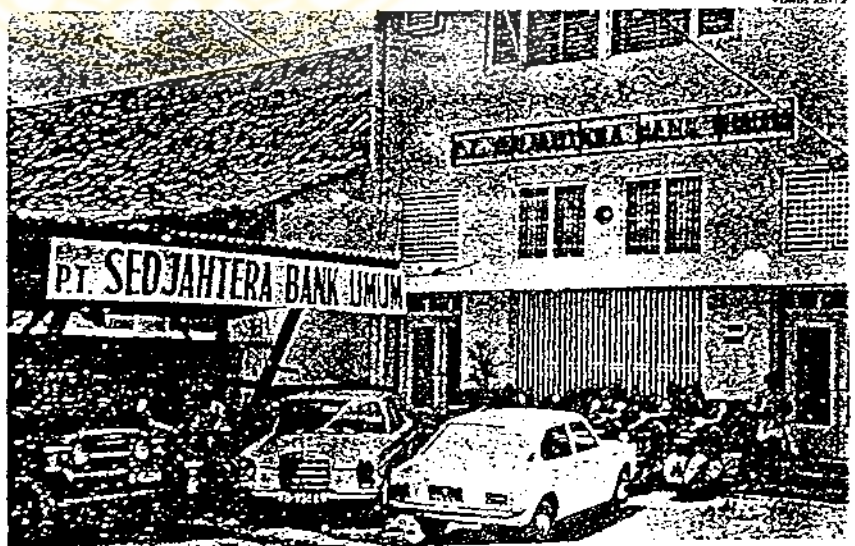
Desember Batas Waktu Merger

SEMAKIN dekat hari terakhir tahun ini — *deadline* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia — makin ramai pembicaraan-pembicaraan di antara bank-bank swasta untuk mengadakan penggabungan-penggabungan. Bahkan ada yang sudah sampai ke taraf pelaksanaan, setelah mendapat izin dan petunjuk dari Departemen Keuangan dan Bank Sentral. Tanggal 1 Desember yang lalu misalnya, di Telukbetung Lampung diadakan upacara sederhana, menandakan peleburan PT Bank Lampung kedalam PT Sejahtera Bank Umum (SBU) yang berpusat di Jakarta. Sege-nap kekayaan dan saham saham Bank Lampung ini telah dibeli oleh PT SBU yang dengan demikian berubah statusnya menjadi PT Sejahtera Bank Umum cabang Telukbetung. Satu bulan sebelumnya, PT Bank Umum Niaga Indonesia yang berkedudukan di Medan, telah menggabungkan diri dengan Sejahtera Bank Umum, menambah modal terbayar (*paid up capital*) bank induk yang berkedudukan di jalan Tiang Bendera Jakarta itu dengan 8 juta rupiah. Walhasil jadilah Sejahtera Bank Umum ini bank *merger* kedua setelah Panin Group, dengan modal terbayar 508 juta dari seluruh modal dasar *statutair* yang tercatat 1 milyar rupiah.

Menggantol bank kecil. Sepintas lalu tampaknya hasil penggabungan-penggabungan itu tidak memperkuat modal Sejahtera Bank Umum sendiri. Akan tetapi sebenarnya, melalui cara itu SBU berhasil membuka cabang di Medan, salah satu di antara 7 kota besar di Indonesia yang sudah tertutup bagi pembukaan cabang bank baru. Begitu pula pembelian seluruh kekayaan dan hutang-piutang Bank Lampung di Telukbetung, yang memudahkan ekspansi kegiatan perbankan ke propinsi yang ramai ekspor hasil buminya. Seperti kata Lesmana Basuki, wakil preskom SBU pada TEMPO, "lebih mudah menggantol bank kecil dari pada mengajak bank-bank yang sudah cukup besar dan kuat untuk bergabung dengan kami". Diakuinya pula, bahwa berbeda dengan yang dilakukan tiga bank swasta yang mengadakan *consolidation* sehingga terbentuk Pan Indonesia Bank Ltd, yang dilakukan SBU baru bertaraf merger. Dengan cara demikian juga dihindari kesulitan mencari pimpinan baru bagi bank-bank yang bergabung — baik *merger* maupun *consolidation* — hal mana lebih mudah terjadi pada bank-bank yang sama besarnya. Kecuali kalau pemilik saham bank-bank besar itu sama-

sama bersepakat untuk mengangkat manager-manager profesional, seperti yang dilakukan oleh Panin.

Sebenarnya sebelum melakukan dua *merger* berturut-turut itu, SBU sudah terbilang sebagai salah satu bank swasta yang terkuat di Jakarta diluar kelompok Panin. Sejarahnya mulai 19 tahun yang lalu di Bandung, ketika disitu didirikan Maskapai Dagang & Bank Hipotik "Sedjahtera" NV. Empat tahun kemudian 1957, namanya berubah menjadi PT Sedjahtera Bank Umum, namun tetap berkedudukan di Bandung. Nasabah-nasabah bank umum itu, yang terutama terdiri dari industri-industri tekstil yang berhamburan di kota-kembang itu, dalam perkembangannya kemudian mendesak SBU memindahkan kantor pusatnya di Jakarta, sehingga lebih siaga menghadapi perkembangan pasar tekstil. Pindahanya kantor pusat itu, terjadi tahun 1968. Di Jakarta, jumlah nasabah SBU bertambah dengan importir-importir berbagai macam barang dagangan yang menitipkan uangnya pada bank ini. Karena belum berstatus bank devisa, urusan-urusan yang begituan dilakukan lewat cabang *The Chartered Bank* yang ada di Jakarta. Berkat relasi dengan bank asing ini, SBU juga mendapatkan bimbingan teknis dari ahli-ahli bank Inggris itu, dan ketika Pemerintah cq Gubernur Bank Sentral melontarkan anjuran pada bank-bank swasta untuk mengadakan merger kesempatan ini dimanfaatkan untuk meluaskan sayap ke Medan dan Telukbetung.



PT SEDJAHTERA BANK UMUM
Lebih mudah menggantol bank kecil

E. No. 16/2/UPUM

Jakarta, 1 Juni 1983

SURAT – EDARAN
Kepada
BANK-BANK UMUM PEMERINTAH
dan
BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
DI INDONESIA

Perihal: Deposito Berjangka Pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/KEP/DIR tertanggal 1 Juni 1983 tentang ketentuan-ketentuan Deposito Berjangka pada Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 1983.

Bertalian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dapat ditemukakan penjelasan dan ketentuan pelaksanaan, sebagai berikut:

Sebagaimana Saudara maklum, Surat Edaran kami terakhir mengenai Deposito Berjangka adalah SE No. 16/1/UPUM tanggal 29 April 1983. Di dalam Surat Edaran tersebut diatur pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/2/KEP/DIR tanggal 28 April 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia yang pada pokoknya menetapkan kebebasan Saudara untuk mengatur sendiri syarat-syarat Deposito Berjangka waktu 6 bulan dan kurang dari 6 bulan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 kini menetapkan, bahwa Saudara diberikan lebih banyak kebebasan untuk menetapkan sendiri jangka waktu, suku bunga dan syarat-syarat lainnya bagi deposito yang ditempatkan pada Saudara.

Walaupun kepada Saudara telah diberikan kebebasan, kami masih

menganggap perlu untuk menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia masih menerima deposito berjangka waktu 24 bulan dengan suku bunga yang pada waktu ini ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 12% (dua belas perseratus) setahun.
 - b. Untuk semua deposito berjangka yang ditempatkan pada Saudara, kepada deposan diberikan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis.
3. Yang kami maksud dengan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis ialah, bahwa pada saat deposan menempatkan deposito pada Saudara, kepada deposan diberikan kesempatan untuk memilih persyaratan:
- a. Deposito berjangka yang biasa yaitu deposito yang berakhir pada akhir jangka waktu yang diperjanjikan, atau
 - b. Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut.
- Tentu saja perpanjangan secara otomatis tersebut dilakukan dengan suku bunga yang berlaku pada Saudara pada saat deposito tersebut diperpanjang.
4. Untuk menampung hasrat masyarakat penabung terhadap jenis deposito yang mudah dipindahtangankan, hendaknya bilyet deposito berjangka yang bersangkutan di samping dikeluarkan atas nama dapat juga dikeluarkan atas unjuk. Dalam hal deposito berjangka dikeluarkan atas nama hendaknya dinyatakan dapat dipindahtangankan. Dalam rangka pengeluaran deposito atas unjuk tersebut bank dapat melakukannya dengan menerbitkan Sertifikat Deposito.
5. Berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi Saudara maka sejak berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 tersebut:
- a. Ketentuan perihal premi bunga tidak berlaku lagi.
 - b. Pembatasan tentang deposito berjangka yang dananya bersumber dari luar negeri, ditiadakan.
6. Bank Indonesia tetap menjamin pembayaran kembali pokok simpanan deposito tersebut.

Lampiran 2

76

Lanjutan lampiran 2

7. Selanjutnya kami minta agar Saudara senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan mengenai deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
8. Mengingat untuk pengadaan blanko bilyet deposito diperlukan waktu yang cukup, maka untuk sementara blanko bilyet yang ada pada Saudara dapat digunakan setelah syarat-syaratnya disesuaikan selanjutnya agar saudara segera melakukan pengadaan blanko bilyet deposito yang syarat-syaratnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru.
9. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka ketentuan-ketentuan mengenai deposito berjangka yang terakhir diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UPUM tanggal 29 April 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa bagi deposito berjangka yang sudah ada pada Bank Saudara sebelum tanggal berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, tetap dinyatakan berlaku menurut ketentuan lama sampai dengan saat berakhir jangka waktunya.

Demikian agar Saudara maklum dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA,

ttd.

ttd.

Arifin M. Siregar

T.M. Zahirsjah

UPUM/TD

dan pembangunan tetap
dan.
Wardhana mengatakan,
it berbagai kebijaksanaan
diambil pemerintah dalam
tahun tersebut ekonomi
esia dapat dikatakan mam
rtahan terhadap pukulan-
an yang diakibatkan
k resesi ekonomi dunia
ut.
pun demikian, kata Ali
hana, dengan tetap ber-
ingnya keadaan perekono-
dunia itu, sangat sulit
ekonomi Indonesia untuk
lapat bertahan secara te-
merus bila tidak diambil
langkah kebijaksanaan
engamanannya.

KETENTUAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT
BANK INDONESIA (SBI)
(Surat Edaran Direksi Bank Indonesia,
No. SE. 16/S/UPUM tanggal 21 Januari 1984)

K e p a d a
SEMUA BANK UMUM,
BANK PEMBANGUNAN,
BANK TABUNGAN DAN
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
D I ,—
I N D O N E S I A .

Dalam rangka melengkapi sarana kebijaksanaan moneter dan perbankan, dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 16/55/KEP/DIR tanggal 21 Januari 1984 terlampir (lampiran I), telah ditetapkan ketentuan pokok mengenai penerbitan SBI.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dikemukakan penjelasan serta ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam dikeluarkannya kebijaksanaan 1 Juni 1983, maka pengendalian moneter dititikberatkan kepada sistem pengendalian secara tidak langsung. Mengingat hal tersebut, dan guna lebih mendorong pengembangan pasar uang serta peningkatan efisiensi pengelolaan dana oleh perbankan, maka Bank Indonesia mengeluarkan SBI dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

1.1. SBI adalah surat pengakuan hutang dalam Rupiah berjangka waktu pendek. Pada tahap pertama jangka waktu SBI ditetapkan 30 (tigapuluh) hari dan 90 (sembilanpuluh) hari.

1.2. Untuk setiap jangka waktu tersebut, pada angka 1.1. di atas akan dikeluarkan SBI pada tahap pertama dengan pecahan masing-masing:

- Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
- Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)
- Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- SBI akan diterbitkan atas anjak.
- 1.4. Penempatan SBI dilakukan dengan sistem pendaftaran atas dasar tingkat diskonto yang ditetapkan Bank Indonesia atau dengan sistem lelang.
 - 1.5. Bank Indonesia hanya menjual SBI kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Sungguh pun demikian, SBI yang belum jatuh waktu dapat diperjualbelikan baik oleh bank, lembaga keuangan bukan bank maupun oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu dan guna lebih mengembangkan pasar uang, maka bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat bertindak sebagai dealer dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan bank adalah bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 (BN No. 2199 hal. 9B-12B).
 - 1.6. SBI tidak dapat dijual kembali kepada Bank Indonesia sebelum jatuh waktu.
 - 1.7. SBI dapat diuangkan sebesar harga nominalnya pada semua kantor Bank Indonesia sejak hari jatuh waktunya oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan demikian masyarakat yang memiliki SBI dapat menguangkan SBI yang telah jatuh waktu melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - 1.8. SBI yang telah jatuh waktu menjadi kedaluwarsa setelah lampau lima tahun sejak hari jatuh waktunya sesuai dengan pasal 19⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pengajuan permohonan pembelian SBI.

Pengeluaran SBI akan dilakukan untuk pertama kali pada tanggal 1 Pebruari 1984, sedangkan pengeluaran berikutnya akan dilakukan secara berkala. Setiap penerbitan akan diumumkan, dan dalam pengumuman tersebut antara lain dicantumkan sistem pendaftaran yang akan ditempuh. Seperti ditetapkan pada pasal 2 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia tersebut, di atas, pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu "atas dasar tingkat diskonto yang ditetapkan Bank Indonesia" atau dengan "sistem lelang". Apabila pendaftaran dilakukan atas dasar "tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia", maka dalam pengumuman tersebut akan diberitahukan pu-

Lampiran 5

78

tingkat diskontonya. Adapun prosedur pendaftaran oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank diatur seperti dibawah ini.

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pengeluaran SBI, Bank Indonesia akan mengumumkan rencana pengeluaran tersebut, kepada semua bank dan lembaga keuangan bukan bank.
2. Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berminat untuk membeli SBI dapat mengajukan permohonannya mulai 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penerbitannya. Pendaftaran tersebut, harus sudah diterima oleh Bank Indonesia cq. Bagian Pengembangan Pasar Uang, Jakarta selambat-lambatnya pukul 09.00 wib. pada hari penerbitan SBI. Pengajuan permohonan pembelian tersebut dilakukan dengan mengisi formulir seperti contoh terlampir (lampiran 2), yang disampaikan kepada:
 - a. Bagian Pengembangan Pasar Uang Bank Indonesia Jalan Pinta Besar Utara No. 3, Jakarta Barat 11001, untuk bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, daerah-daerah tingkat II Serang, Pandeglang, Tangerang, Bogor, Krawang dan Bekasi.
 - b. Kantor Cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank yang berkedudukan di luar wilayah seperti dimaksud pada butir a. di atas.

Untuk Sementara waktu, setiap bank/lembaga keuangan bukan bank diminta untuk menunjuk satu kantor pada setiap wilayah kerja kantor Bank Indonesia untuk bertindak sebagai pembeli untuk dan atas nama kantornya sendiri maupun kantor lainnya yang berada di tempat kedudukan kantor Bank Indonesia tersebut. Selanjutnya perlu ditegaskan, bahwa surat permohonan pembelian SBI yang ditandatangani oleh bank/ lembaga keuangan bukan bank juga berfungsi sebagai kuasa kepada Bank Indonesia untuk membebani rekening pada Bank Indonesia guna menyelesaikan transaksi pembelian sertifikat tersebut. Oleh sebab itu permohonan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di atas meterai dan pemohon berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk melaksanakan pembelian sertifikat dimaksud.

3. Pelaksanaan penerbitan SBI.

- 3.1. Berdasarkan permohonan pembelian yang diterima pada hari penerbitan SBI, Bank Indonesia menetapkan jumlah dan nilai total sertifikat yang akan dikeluarkan pada hari itu. Adapun alokasinya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pendaftaran dilakukan atas dasar diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka jika jumlah permintaan SBI melebihi jumlah yang dapat dijual, alokasi SBI akan dilakukan secara prorata.
 - b. Dalam hal pendaftaran dilakukan atas dasar lelang, maka pada tahap pertama SBI akan dialokasikan kepada pembeli yang meminta diskonto lebih rendah dari tingkat diskonto yang dianggap wajar oleh Bank Indonesia (cut-off rate). Apabila jumlah permintaan SBI dengan tingkat diskonto yang sama dengan tingkat diskonto yang dianggap wajar oleh Bank Indonesia melebihi jumlah yang dapat dijual, maka alokasi untuk tingkat diskonto tersebut, dilakukan secara prorata.
 - 3.2. Selanjutnya sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh bank lembaga keuangan bukan bank yang bersangkutan, pada hari yang sama Bank Indonesia akan membebani rekening pembeli pada Bank Indonesia sebesar nilai sertifikat yang disetujui untuk dibeli setelah diperhitungkan diskontonya. Perhitungan diskonto tersebut dilakukan atas dasar 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tigapuluh) hari. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa apabila dana bank/lembaga keuangan bukan bank yang bersangkutan ternyata tidak mencukupi, maka seluruh pembelian tersebut dengan sendirinya dianggap batal.
 - 3.3. Segera setelah pembebanan rekening bank/lembaga keuangan bukan bank tersebut efektif, pembeli dapat mengambil sertifikat yang dibelinya atau menyimpannya di kantor Bank Indonesia setempat. Penyimpanan di kantor Bank Indonesia tersebut, dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara penyimpanan surat berharga yang berlaku tanpa dikenakan biaya simpan.
4. Pembayaran kembali SBI yang sudah jatuh waktu, SBI baru dapat diuangkan pada hari jatuh waktunya di kantor Bank

Indonesia. Apabila hari jatuh waktu sertifikat tersebut jatuh pada hari libur, maka penguangannya baru dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaksanaan pembayaran kembali SBI akan dilakukan sesuai dengan keinginan pemilik sertifikat, yaitu dapat dilakukan baik secara tunai atau pemindahbukuan. Dalam hal pembayarannya dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan, permohonan pelunasannya dilakukan dengan mengisi formulir seperti terlampir (lampiran 3).

5. Jual – beli SBI.

Sebagaimana dikemukakan pada angka 1.5. tersebut. di atas SBI dapat diperjualbelikan baik oleh bank, lembaga keuangan bukan bank maupun oleh masyarakat. Sementara itu di dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 16/55/KEP/DIR pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa dengan persetujuan Bank Indonesia bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat bertindak sebagai dealer SBI. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut:

5.1. Yang dapat ditunjuk menjadi dealer SBI adalah:

- a. bank pemerintah,
- b. bank umum swasta nasional,
- c. bank pembangunan daerah,
- d. lembaga keuangan bukan bank,

Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan suatu bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk menjadi dealer antara lain didasarkan pada penilaian kesehatannya.

5.2. Adapun tugas pokok dealer antara lain ialah:

- a. melakukan jual beli SBI untuk dan atas nama sendiri,
- b. mengumumkan tingkat diskonto yang ditawarkan untuk jual dan beli,
- c. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

6. Ketentuan lainnya.

Disamping ketentuan tersebut. di atas, perlu kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Untuk SBI yang cacat, dapat diganti dengan SBI baru sepanjang masih dapat dibuktikan keasliannya.
- 6.2. Sertifikat Bank Indonesia tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen alat likuid dalam perhitungan likuiditas Rupiah.

- 6.3. Dalam laporan likuiditas, SBI yang dimiliki oleh bank bendalirnya dilaporkan pada angka 11 huruf A Aktiva. berupa penambahan pos baru, angka 4 dengan nama Sertifikat Bank Indonesia. Dalam laporan bulanan SBI tersebut dilaporkan di bawah pos Bank Indonesia, yaitu pada angka 3c Aktiva dengan nama Sub Pos Sertifikat Bank Indonesia, sedangkan Sub Pos Lainnya diubah menjadi Sub Pos 3D Aktiva. Di dalam kedua laporan tersebut SBI dilaporkan sebesar nilai nominalnya.

Demikian agar ketentuan di atas mendapat perhatian Saudara.

DIREKSI BANK INDONESIA

ttd.
Arifin M. Siregar

ttd.
B. I. K. A. D. I.

PERUBAHAN PERKREDITAN BANK-BANK PEMERINTAH
(Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. SE. 16/1/UKU
tanggal 1 Juni 1983)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KEPADA:
SEMUA BANK-BANK PEMERINTAH
DI
INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan SK Direksi Bank Indonesia No. 16/9/EP/DIR tertanggal 1 Juni 1983 (BN No. 3914 hal. 7B-8B) tentang hal tersebut di atas. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan ketentuan pelaksanaan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya SK Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, maka kredit-kredit yang diberikan oleh Bank-bank Pemerintah terdiri atas:
 - a. Jenis-jenis kredit yang berprioritas tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK Direksi Bank Indonesia termaksud di atas yang suku bunga dan syarat-syarat kreditnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Jenis-jenis kredit yang tidak tergolong pada jenis kredit tersebut pada huruf a yang suku bunga dan syarat-syarat kreditnya ditetapkan sendiri oleh Bank yang bersangkutan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 SK Direksi Bank Indonesia tersebut untuk jenis-jenis kredit tersebut pada angka 1 huruf a, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang suku bunga dan besarnya kredit likuiditas seperti terlampir.
3. Di samping angka 2 di atas, Bank Indonesia bersasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat pula mempertimbangkan kredit likuiditas atas dasar diskonto ulang yang akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
4. Mengenai kredit kepada Koperasi yang tergolong berprioritas tinggi dapat ditambahkan penjelasan bahwa:
 - a. Yang dimaksud dengan kredit kepada Koperasi untuk anggota-

anggotanya adalah kredit-kredit yang diteruskan oleh Koperasi yang bersangkutan kepada anggota-anggotanya dalam jumlah-jumlah yang tidak melebihi KIK atau KMKP untuk masing-masing anggota.

- b. Yang dimaksudkan dengan pengadaan barang berprioritas tinggi pada waktu ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi untuk pengadaan pangan, palawija, tebu rakyat dan cengkeh.
5. Kredit kepada Koperasi yang tidak termasuk pada angka 4 di atas dan untuk kredit investasi yang melebihi jumlah Rp 75 juta, maka suku bunga dan syarat-syaratnya ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank Pemerintah.
6. Perlu dikemukakan bahwa jumlah plafond KIK dan KMKP sekarang masing-masing menjadi maksimal Rp 15 juta. Suplesi atau tambahan plafond KIK dan KMKP yang berlaku dewasa ini masing-masing sebesar Rp 5 juta diiadakan.
7. Untuk kredit-kredit kepada nasabah yang akad kreditnya telah ditandatangani sebelum berlakunya SK Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, tetap berlaku ketentuan lama sampai berakhirnya jangka waktu kredit yang bersangkutan. Untuk kredit-kredit yang akad kreditnya telah ditandatangani dengan nasabah dan hingga berlakunya SK Direksi Bank Indonesia tersebut di atas belum diuntakan kredit likuiditas, bank yang bersangkutan dapat mengajukan kredit likuiditas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya s/d tanggal 31 Agustus 1983.
8. Dalam hubungan dengan angka 1 huruf b di atas ketentuan-ketentuan dalam rangka Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang selama ini berlaku misalnya tentang:
 - pemenuhan dana sendiri nasabah (self financing),
 - penyusunan feasibility study oleh Biro Konsultan,
 - laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Terdaftar yang memiliki izin usaha,
 - pengajuan persetujuan prinsip (clearance in principle) kepada Bank Indonesia,
 - persyaratan konsorsium kredit dan
 - batas maksimum kredit per proyek,diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing Bank Pemerintah untuk menetapkannya.

9. Perlu ditegaskan bahwa Kredit Investasi tetap hanya dapat diberikan kepada pengusaha/perusahaan sebagai mana berlaku dewasa ini.
Demikian pula Bank-bank Pemerintah tetap tidak boleh memberikan Kredit Modal Kerja kepada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (P.M.A)/Perusahaan Patungan (Joint Venture).
10. Walaupun telah diberikan wewenang kepada Bank-bank Pemerintah untuk memutuskan dan menetapkan syarat-syarat kredit yang tidak berprioritas tinggi, kiranya tidak berlebihan kalau kami minta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, hendaknya tetap mendasarkan diri kepada asas-asas pemberian kredit yang sehat, dengan memperhatikan antara lain:
 - pemenuhan dana sendiri,
 - penyusunan feasibility study,
 - laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Terdaftar yang memiliki izin usaha,
 - kejenuhan suatu proyek atau sektor ekonomi tertentu,
 - b. Mengusahakan pemberian kredit untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi termaksud pada angka 1a di atas dalam jumlah yang wajar dari seluruh porto-folio kredit Bank Saudara.
 - c. Bidang usaha sebagai proyek prioritas dan non-prioritas berdasarkan Daftar Skala Prioritas Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.

Demikian agar Saudara maklum dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA,

ttd.

ttd.

Arifin M. Siregar

Kamardy Arief

Devaluasi Kurang Tepat, Lebih Banyak Negatifnya

JAKARTA: Dengan dilakukan devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika sekarang ini maka otomatis subsidi minyak naik kembali karena sebagian besar minyak masih diimpor untuk kebutuhan di dalam negeri.

Demikian dikemukakan H. Probosutejo ketika diminta komentarnya mengenai kebijaksanaan devaluasi yang mulai berlaku hari Rabu.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu sore ia mengatakan, devaluasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu lingkaran setan.

Devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar sekarang ini

kurang tepat katanya. Ia memperkirakan pemerintah tidak mempunyai persediaan dolar AS yang cukup banyak.

Pengusaha nasional yang dikenal pula sebagai pembina utama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) itu mengatakan, dengan devaluasi rupiah maka beban pemerintah makin berat.

Probosutejo yang juga adalah wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu mengatakan, tujuan devaluasi sebenarnya untuk merangsang ekspor. Karena penerimaan pengekspor dari dolar yang sudah dikonversikan dengan rupiah

akan menjadi lebih tinggi.

Tetapi ia mengingatkan, kenyataannya belum tentu demikian, karena komoditas yang akan diekspor itu tidak ada. "Barangnya tidak, hasil bumi pun belum meningkat."

Kalaupun ada komoditasnya hal itu dikonsumsi untuk kebutuhan di dalam negeri. Sebagai contoh, kata Probo, minyak kelapa sawit. Menurut dia, devaluasi yang dilaksanakan sekarang ini kurang manfaatnya.

Tetapi kalau dilakukan nanti setelah produksi meningkat sehingga hasil produksi itu tidak dapat diekspor karena biaya terlalu tinggi, barulah dilakukan devaluasi karena tepat waktunya, kata pembina utama Hippi.

Dengan devaluasi sekarang ini, keadaannya sudah tidak cocok lagi karena harga BBM sudah dinaikkan. tambahnya. Ia mengatakan akibat devaluasi, dalam waktu seminggu ini tampaknya transaksi perdagangan akan menjadi lesu karena penyesuaian - penyesuaian keadaan moneter yang baru itu.

Atas pertanyaan tentang adanya tempat - tempat penukaran uang asing (money changers) dan bank-bank yang tidak menjual-belikan dolar dua hari belakangan ini, ia mengatakan kemungkinan pengusaha - pengusaha sudah menduganya bakal terjadi devaluasi.

Ia mengatakan, menurut informasi dari bank-bank di Singapura, ratusan juta dolar masuk ke bank-bank di kota itu yang ditransfer oleh pengusaha - pengusaha warga negara Indonesia belum lama ini.

MULJOMISENO

Rachmat Muljomiseno, bekas menteri perdagangan RI (1958 - 1969) berpendapat, dilihat dari segi rupiah yang ditainya terlalu rendah (over value) memang pada waktunya harus ada devaluasi.

Tetapi, apabila dilihat bahwa akibat dari tindakan itu akan lebih banyak dampak negatifnya ketimbang positifnya, "sampai sekarang saya bertahan pada pendirian agar pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melakukan tindakan devaluasi".

Ia yang memberikan keterangan itu Rabu siang, beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan devaluasi mata uang RI, melihat bahwa yang pasti devaluasi akan menaikkan harga, termasuk biaya produksi.

"Devaluasi", kata Rachmat, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VII (Keuangan, Perdagangan dan Perbankan) dan ketua Komisi VI (Pertambangan, Perindustrian dan BKPM) DPR, "seharusnya dapat mendorong ekspor".

"Tapi saya menilai hal itu tidak mungkin karena pasaran luar negeri bagi komoditas ekspor RI masih sepi, ditambah lagi dengan masih berlangsungnya perang harga minyak," ujar Rachmat.

Rachmat Muljomiseno dalam keterangan di kantornya di salah satu bank di Jakarta, menilai dengan tindakan devaluasi itu yang menjadikan satu dolar AS bernilai Rp 970,00 maka pemerintah akan memperoleh penerimaan yang lebih besar. "Dan rupanya inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan devaluasi," katanya.

Dalam hal ini, Rachmat mengajak untuk menengok latar belakang dilakukannya tindakan devaluasi itu. Pertama, tabungan pemerintah untuk tahun anggaran 1983-1984 berjumlah Rp 6,5 trilyun, bantuan program dan proyek Rp 2,7 juta trilyun. Ini berarti belanja pembangunan Rp 9,2 trilyun. Yang meresahkan adalah tabungan pemerintah, karena menurunnya penerimaan dan membesarnya defisit neraca pembayaran. Jadi kalau pada I April 1983 APBN 1983-1984 mulai

berjalan, tentunya harus ada penerimaan yang cukup. "Dan sementara ini, dengan adanya devaluasi, nampaknya pemerintah dapat memulai dengan Repelita IV," katanya.

"Tetapi yang menjadi persoalan," kata Rachmat Muljomiseno, "adalah mencegah terulangnya kembali sikap berlebihan dengan adanya dana yang tersedia." "Kencangkan ikat tali pinggang harus tetap berlaku," katanya.

Masalah kedua, kata Rachmat, benarkah dengan devaluasi ini defisit neraca pembayaran dapat ditutup. Bila dilihat dari segi perdagangan dalam negeri, maka sebelum ada devaluasi orang dipaksa membeli barang-pun tidak mau.

Ini menunjukkan daya beli yang sangat lemah. Dengan adanya kenaikan harga karena devaluasi, maka pasaran akan

jual barangnya seperlunya dan secara tak terencana barang-barang sedikit demi sedikit akan lenyap dari pasaran.

"Karena itu, beruntunglah mereka yang memiliki valuta asing, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan adanya devaluasi," kata Rachmat

Lampiran 6

DEVALUASI, TANPA PETIR

elah devaluasi, pemerintah berharap bisa mengumpulkan uang minyak 10 milyar. Impor akan dipotong, dan proyek-proyek besar akan jinjau lagi. Tapi yang mana, itu masih jadi pertanyaan.



KALI ini namanya pasti bukan "kenop". Tapi hentakannya sama. Hari itu 30 Maret, pekan lalu, sidang kabinet baru. Esoknya juga mulai tahun anggaran baru. Sidang ditutup dengan keputusan yang membuat seluruh ekonomi bergerak. Tepat pukul 11.30, Presiden Soeharto yang memimpin sidang pleno kabinet, memutuskan: rupiah didevaluasi menjadi 970 untuk satu dollar AS.

Agak mengejutkan memang. Di hari yang tenang, anehnya koran-koran memuat ketegangan ketua umum Perbanas, I Nyoman Guna, yang merasa yakin "pemerintah tak akan melakukan tindakan devaluasi rupiah."

Malum. Orang agaknya masih teringat ke negara 16 Agustus 1982 di DPR, ketika Presiden mengatakan: pemerintah berpendapat dan menegaskan

tidak perlu mengadakan devaluasi rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap uang asing akan tetap dibiarkan mengambang terkendali seperti sekarang ini." Juga Menteri Keuangan Ali Wardhana dalam wawancara khusus TEMPO, 27 November tahun lalu, mengatakan, "tak ada kebutuhan melakukan devaluasi lagi, karena rupiah sudah diambang."

Tapi banyak orang, terutama kalangan pengusaha, sebenarnya sudah menunggununggu terjadinya tindakan moneter itu. Bahkan sebagian sudah menduga devaluasi akan dilakukan menjelang tutup tahun anggaran. Sebab saat itu adalah hari terakhir Pelita III, hari penutupan transaksi di Bursa Valuta Asing, dan kliring di BI. Semua itu sungguh bertepatan dengan sidang pertama Kabinet Pembangunan IV.

Mungkin itu pula sebabnya permintaan akan valuta asing ke BI mendadak naik hebat. Di bulan Januari permintaannya baru US\$ 40 juta, Tapi pada Maret lalu konon telah mencapai sekitar US\$ 1 milyar. Maka

ketika palu devaluasi rupiah diketukkan oleh Presiden, mereka tak lagi mendengarnya bagaikan halilintar di siang bolong, seperti yang terjadi pada devaluasi November 1978.

Tapi siapa bisa jadi peramal melihat ekonomi dunia kini? Kendali terhadap rupiah ketika itu memang belum dikendalikan, sekalipun harga minyak mulai tidak karuan. Kendali itu hanya dikendalikan — secara pelan, hampir dengan perasaan — oleh Bank Indonesia, dengan membiarkan depresiasi rupiah merangkak hingga mencapai 700 untuk satu dollar di awal Maret yang lalu.

Tapi situasi ekonomi mendadak berubah. Organisasi para pengeksport minyak (OPEC) yang bersidang di London pertengahan Maret lalu mencapai konsensus, menurunkan harga patokan jenis *Arabian Light Crude* dengan 5 dollar. Dengan kata lain, menjadi 29 dollar per barrel.

Sepekan sesudahnya, 21 Maret, dua hari sebelum pelantikan kabinet baru, harga ke-18 jenis minyak Indonesia rata-rata diturunkan dengan US\$5,27 per barrel. Dan jenis Minas, patokan minyak Indonesia, turun dengan 5 dollar, menjadi 29,53 dollar per barrel, yang berlaku surut sejak 23 Februari lalu.

Sumber : *Majalah Tempo*, No. 10, Th. XIII, 7 Mei 1983

Lampiran 7

Pengaruh Devaluasi Masih Terasa Terhadap Perkembangan Harga

SURABAYA, JP.

Dampak dari devaluasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar sampai dengan bulan Mei 1983 masih terasa terhadap perkembangan harga barang-barang dan jasa kebutuhan masyarakat konsumen di Surabaya dimana masih adanya kecenderungan untuk naik. Namun kenaikan yang terjadi pada bulan Mei 1983 tidak sebesar jika dibandingkan dengan kenaikan selama Bulan April 1983 yang lalu. Demikian pengamatan Kantor Statistik Ja-Tim.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup 150 jenis barang dan jasa, laju inflasi di Surabaya selama Bulan Mei 1983 sebesar 1,47% sedangkan Bulan April 1983 mencapai 2,78%. Perkembangan harga

Bulan Mei tersebut ternyata di Surabaya lebih tinggi dibanding gambaran perubahan harga nasional, sebab inflasi nasional untuk bulan tersebut hanya 0,87%

Dari pengelompokan jenis barang dan jasa yang terdiri dari 4 sektor ternyata sektor makanan yang mempunyai peranan cukup besar ($\pm 40\%$) selama Bulan Mei 1983 masih menunjukkan kenaikan terbesar yaitu 3314% dalam inflasi bulan Mei yang lalu dibanding 3 Sektor lainnya seperti Sandang naik 1,55%; Perumahan 0,38% dan Aneka 0,08%.

Secara kumulatif laju inflasi di Surabaya selama Januari-Mei Tahun 1983 dan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebagai berikut (%): (Lihat tabel I).

Tabel I

Sektor	1980	1981	1982	1983
-Makanan	9,43	3,83	-0,37	3,52
-Perumahan	10,68	5,20	9,35	9,59
-Sandang	5,56	1,26	3,46	1,51
-Aneka	13,21	6,10	9,02	12,47
U m u m	10,19	4,45	4,75	7,06

Ternyata inflasi 5 bulan pertama tersebut selama 4 tahun terakhir untuk tahun 1983 relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 1980. Walaupun demikian angka tersebut khususnya tahun 1983

masih lebih rendah dibanding inflasi Nasional (7,43%). Sementara itu untuk inflasi selama tahun anggaran yang baru meliputi 2 bulan (April-Mei) sebagai berikut (%):

(Lihat tabel II).

Tabel II

Sektor	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
-Makanan	3,84	5,41	0,88	-0,10	5,98
-Perumahan	7,94	6,24	3,40	0,70	3,14
-Sandang	6,09	2,22	0,46	0,97	1,84
-Aneka	9,56	10,42	1,79	0,16	3,66
U m u m	6,38	6,42	1,73	0,28	4,26

Kondisi perubahan harga selama April dan Mei 1983 diatas tahun anggaran 1981/1982 dan 1982/1983 tetapi lebih rendah bila terhadap 1979/1980 dan 1980/1981. Sangat diharapkan pada bulan-bulan selanjutnya situasinya lebih mudah dikendalikan dan stabilitas terjaga menjelang Puasa dan Hari Raya Idul Fitri (Juni Juli 1983).

Khusus perkembangan harga komoditi-komoditi untuk bulan Mei 1983 yang lalu ada beberapa jenis barang yang mengalami kenaikan relatif cukup besar seperti pada

Sektor Makanan

-Mie Kering	naik	6,25%
-Ketela Pohon	naik	3,09%
-Daging Babi	naik	6,59%
-Udang	naik	4,35%
-Susu Bubuk	naik	5,83%
-Susu Kental	naik	3,57%
-Bayam	naik	23,08%
-Kangkung	naik	14,29%
-Ketimun	naik	28,87%
-Terong Panjang	naik	25,00%
-Bawang Putih	naik	65,78%
-Gula Merah	naik	12,12%
-Lombok Merah	naik	17,14%
-Terasi Udang	naik	5,77%
-Kelapa	naik	20,83%
-Margarine	naik	10,78%
-Green Spot	naik	10,63%
-Biskuit	naik	16,67%
-Roti Tawar	naik	21,43%

Sektor Perumahan

-Semen	naik	3,80%
-Kayu Balokan	naik	1,96%
-Korek Api	naik	20,00%
-Pembasmi Nyamuk	naik	20,00%

Sektor Aneka

-Minyak Rambut	naik	6,25%
-Bedak	naik	9,09%
-Sepatu Olah Raga	naik	1,69%
-Bir	naik	4,44%

Sektor Sandang

-Sepatu Wanita	naik	10,00%
-Sepatu Anak-anak	naik	20,54%

Demikian ulasan secara ringkas keadaan perkembangan harga barang dan jasa di Surabaya selama bulan Mei 1983 maupun periode sebelumnya.

Sumber : Koran Jawa Pos, Tahun XXXI No. 278, 4 Juni 1983

Pembebasan Suku Bunga Deposito

Diharapkan Dana-dana yang Lari
Bisa Kembali ke Dalam Negeri

SULABAYA, JP.

Dampak positif dari kelonggaran yang diberikan pada bank-bank pemerintah untuk penghimpun dana dari masyarakat, dengan cara membebaskan menentukan suku bunganya sendiri, memang akan menimbulkan keadaan keuangan yang lebih baik. Tapi keberhasilan dari penggunaan dana yang sudah terkumpul, itu tergantung cara penyelesaiannya nanti. Demikian dr. Tjiptono Dar madji pada Jawa Pos kemarin sore, menanggapi kebijaksanaan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

Tapi sebenarnya, langkah yang diambil pemerintah ini sudah terlihat sebelum terjadinya devaluasi rupiah terhadap dollar. Ketika semakin banyak dana masyarakat yang terserap ke luar negeri, sehingga bank-bank di Indonesia praktis kekurangan dana. Jadi dengan adanya pembebasan suku bunga deposito pada bank-bank pemerintah, diharap dana-dana yang lari bisa kembali ke dalam negeri.

"Memang bisa dipahami, kalau pemerintah baru sekarang menempuh cara ini. Sebab sebelumnya, pemerintah cukup berhati-hati dan menunggu keadaan kembali stabil setelah terjadi devaluasi. Setelah laju

inflasi menunjukkan penurunan sekitar 0,87 persen, baru upaya menghimpun dana ini bisa dianggap tidak akan menggoncangkan laju pertumbuhan ekonomi ujar Tjiptono.

Menyinggung masalah ditipuskannya pagu kredit, Tjiptono menjelaskan, bahwa ini adalah langkah positif yang diberikan pemerintah guna semakin berkembangnya bank-bank itu sendiri. Bank tidak akan lagi terikat dengan pagu kredit yang ada, yang menyebabkan pinjaman bank menjadi sangat terbatas sekali. Dengan demikian bank akan lebih bebas menentukan jumlah dana pinjaman yang disediakan, khususnya untuk dana pembangunan yang tidak konsumtif. Ini merupakan konsekuensi logis, jika menginginkan bank-bank pemerintah akan bisa menyerap dana dari masyarakat sebanyak mungkin.

"Yang jelas, dengan terserapnya dana masyarakat untuk dipergunakan oleh bank-bank tersebut. Bank pemerintah harus bekerja seefisien mungkin dalam pekerjaan yang bervolume besar itu, dalam bidang pelayanan yang biasanya berbelit itu, hendaknya bisa disesuaikan dengan bank-bank swasta yang lebih berani memberikan pelayanan langsung. Sehingga masyarakat sendiri

akan memperoleh kemudahan untuk memperoleh pinjaman untuk modal usahanya." ujar Tjiptono tegas.

Pelayanan langsung, menurut Tjiptono, tidak akan menanggung resiko yang besar, sebab bank-bank pemerintah bisa menyeleksi pinjaman yang ada. Toh kredit prioritas masih ditentukan oleh pemerintah, sedang pelayanan langsung adalah kebijaksanaan dari bank-bank itu sendiri.

Dalam pada itu, Tjiptono melanjutkan (Bersambung ke hal 12)

Diharapkan....

(Sambungan dari hal 2)

ngatakan, bahwa persaingan antara bank pemerintah dengan bank swasta sangat kecil kemungkinannya. Sebab bank pemerintah selalu memberikan suku bunga kredit lebih rendah daripada bank swasta. Bisa dikatakan bank pemerintah akan lebih banyak bisa menyerap dana masyarakat, tapi tergantung sampai berapa tinggi suku bunga deposito yang diberikan pada masyarakat tersebut.

"Pada akhirnya, setelah dana masyarakat bisa terserap. Masalahnya adalah bagaimana bank-bank tersebut pandai-pandai mengatur dana yang sudah ada dan yang akan terus terkumpul itu", ujar Tjiptono.

(TWA)

Sumber: Koran Jawa Pos, Tahun XXXI No. 278, 4 Juni 1983

Laporan Khusus

Bank Bersaing Total

Pengantar

Persaingan antar bank dalam bisnis uang dan kepercayaan di Indonesia makin bertambah seru, setelah Bank Indonesia (BI) memberikan kebebasan kepada bank-bank pemerintah untuk menentukan sendiri tingkat suku bunga deposito dan kredit semenjak 1 Juni 1983. Sambutan gembira beberapa bankir, setidaknya-tidaknya dari kalangan bank pemerintah dan bank umum devisa swasta nasional, ternyata juga diselingi perasaan khawatir pengelola bank-bank kecil. Gilasan dan jepitan, atau kemungkinan terjadinya pencaplokan bank-bank kecil, akan dilakukan oleh bank-bank besar dalam pertarungan bebas, yang tidak lagi menghiraukan tingkat kelas bank ini.

Bagi Direktur Bank Duta Ekonomi, Drs. Abdulgani, kehancuran atau tergilasnya bank-bank kecil belum akan terjadi dalam situasi pasar di Indonesia yang masih heterogen. Sebab, katanya, masih tersisa market yang cukup luas yang perlu dilayani bank-bank kecil karena bank-bank besar sudah malas melayaninya. Sedangkan Mochtar

Riady, Direktur Bank Central Asia, melihat bank-bank di Indonesia baru memberikan 15 jenis jasa dari 48 jenis pelayanan menurut standar perbankan internasional. "Mereka belum fully utilized," katanya.

Mochtar Riady jugs melihat struktur ekonomi Indonesia seharang sekitar 80 persen dikuasai oleh pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka diharuskan berhubungan dengan bank-bank pemerintah dalam melakukan kegiatannya, 20 persen sisanya masih diperebutkan kembali oleh bank pemerintah, asing dan swasta nasional. Hal ini sangat membatasi tingkat pertumbuhan bank swasta. Selain itu, memang faktor pemilik saham (shareholder) dan grup pendukung bank turut menentukan maju mundurnya bank-bank swasta nasional di Indonesia. Lantas bagaimana prospek bank-bank swasta nasional di masa mendatang?

Pengumpulan bahan dan wawancara laporan khusus ini dilakukan oleh Paulus Widiyanto, Edward Soaloon Simandjuntak dan Doddy Rudianto. Laporan khusus ini ditulis oleh Paulus Widiyanto.

Redaksi.

Sumber : Laporan khusus majalah Prisma Tahun XII, No. 7, Juli 1983

Lampiran 10

Ekonomi & Bisnis

Menyedot Rupiah dari Bawah Bantal

Bank pemerintah bermaksud menaikkan suku bunga deposito berjangka 6 bulan, agar bisa bersaing dengan bank swasta. Bersediakah pemerintah memisalkannya, agar dana itu tak terus menganggur?

MULAI bulan ini, pelbagai bank pemerintah akan memberikan bunga menarik untuk deposito berjangka 6 bulan. Beleid untuk menyedot kembali dana rupiah, yang membanjir sesudah devaluasi itu, dikemukakan Menteri Keuangan Radikus Prawiro pelan lalu. Tanpa menyebut rincian kenaikan bunga itu, Menkeu Radikus mengatakan pihak bank mempunyai kebebasan penuh menentukan tingkat bunga baru deposito itu.

Sejumlah bankir swasta menduga tingkat bunga deposito berjangka 6 bulan itu akan naik dari 6% jadi sekitar 8% per tahun. Tapi berapa persisnya tingkat bunga itu, menurut Bank Bumi Daya Omar Abdalla, yang mula-mula mengungkapkan beleid baru di bidang perbankan itu kepada *Suara Karya*, belum bersedia mengatakannya. Keknya dihubungi, Dirut BNI 1946 Somala Wiria, juga masih belum bisa memberikan angka perkiraan. "Kami masih harus menghitungnya secara cermat," katanya.

Perhitungan cermat memang harus dilakukan. Jika volume deposito berjangka 6 bulan itu lebih besar dibandingkan dengan yang berjangka 3 bulan dan 24 bulan, kenaikan tingkat bunga tentu tidak akan besar. Sampai minggu pertama Maret, volume deposito 6 bulan di pelbagai bank pemerintah seperti BBD, dan BNI 1946, tercatat Rp 11,6 milyar atau hanya 1,3% dari jumlah total deposito Rp 905,3 milyar. Mengingat volume deposito 6 bulan itu tidak besar, kenaikan bunga 1 sampai 2%

tentu tidak akan menyebabkan pengeluaran operasional untuk biaya bunga naik menyolok.

Kendati demikian, menurut Somala Wiria, bank tetap harus memperhitungkan dengan baik pengeluaran biaya bunga untuk deposito dengan komponen dana lainnya. Sebagai sumber dana dari pihak ketiga, deposito memang merupakan sumber dana mahal jika dibandingkan rekening giro, tabungan, maupun likuiditas dana dari Bank Indonesia. Untuk dana likuiditas dari BI bagi kredit ekspor, misalnya, bank hanya mengeluarkan biaya bunga 4%. Besar kecilnya setiap komponen sumber dana itu jelas turut menentukan volume biaya dana (*cost of fund*), yang harus dikeluarkan, "Jadi kalau sumber dana yang mahal itu tidak banyak, ya tidak sakit buat bank," ujar Somala.

Buat bank swasta nasional, dan asing, pengeluaran biaya bunga untuk deposito 6 bulan cukup besar mengingat suku bunga yang mereka berikan berkisar antara 16-18% per tahun. Citibank, misalnya, memberikan bunga 16% untuk deposito 6 bulan dengan minimum simpanan Rp 5 juta. Panin Bank, untuk jangka yang sama, dengan simpanan minimum Rp 2 juta, berani memberikan bunga 17% per tahun. Karena tidak memperoleh dana likuiditas dari BI, mereka memang didorong untuk menyedot

sebesar mungkin dana deposito dengan menawarkan tingkat bunga yang bersaing dibandingkan bank pemerintah.

"Kami tidak akan menaikkan suku bunga deposito lagi, sebab masih banyak dana rupiah masyarakat di bawah bantal," kata Fuady Mourad, direktur Panin Bank. James Riady, dirut Bank Pertiagaan Indonesia, juga belum merasa khawatir menghadapi usaha pemerintah menyedot rupiah itu. "Dana di masyarakat masih besar," katanya kepada wartawan TEMPO Marah Sakti.

Dia benar. Sampai akhir Maret lalu, jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat meliputi Rp 2,9 trilyun (41%), sedang uang giral yang berada dalam bentuk dana di pelbagai bank mencapai Rp 4,2 trilyun. Pada September tahun lalu, posisi uang giral itu berjumlah Rp 4,7 trilyun. Tapi ketika muncul desas-desus rupiah akan didevaluasi, banyak anggota masyarakat yang panik, melakukan penarikan dana-dana mereka. Perubahan sikap pemilik rupiah itu telah menyebabkan berkurangnya pelbagai dana di perbankan (uang giral) sebesar Rp 500 milyar hingga Maret lalu.

Dana sebesar itulah yang diperkirakan masih banyak mengemam di bawah "bantal": biasanya berbentuk emas, valuta asing (dolar AS), rupiah tunai, dan berupa tanah atau rumah. Bertolak dari kenyataan itu, James menganggap tindakan pemerintah menaikkan bunga deposito 6 bulan memang "perlu untuk merangsang masyarakat, yang selalu pegang uang tunai agar menyimpan uang mereka di bank." Fuady dari Panin Bank menilai kenaikan bunga deposito itu "wajar" adanya mengingat tingkat bunga sebesar itu sudah berlaku sejak 1978. "Kalau tingkat bunga itu tidak dinaikkan, banyak deposito bank pemerintah akan semakin lari ke bank swasta," katanya.

Empat tahun lalu, volume deposito 6 bulan ini mencapai Rp 74,7 milyar. Sesudah pelbagai bank swasta maupun asing berani

Sumber: *Majalah Tempo*, No. 10, Th. XIII, 7 Mei 1983

Ekonomi & Bisnis

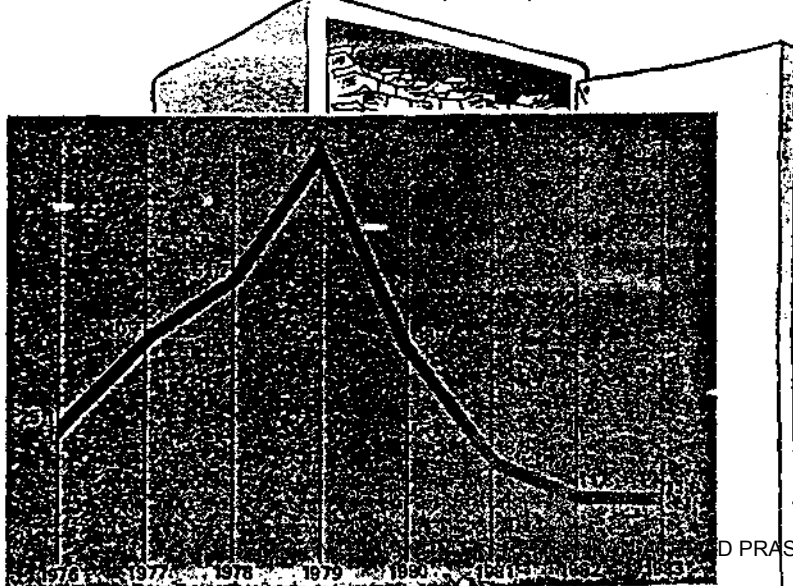
menawarkan tingkat bunga lebih tinggi, jumlah itu secara berangsur berkurang banyak. Apalagi kemudian di masyarakat muncul pula instrumen investasi yang cukup bersaing: sertifikat saham dengan dividen menarik, obligasi dengan bunga 15,5% per tahun, dan dollar AS yang cenderung naik nilainya (*lihat grafik*).

Karena itulah untuk menangkal tawaran investasi yang kompetitif tadi, pemerintah mengizinkan bank di lingkungannya menaikkan bunga deposito, dan menerbitkan obligasi. Persoalannya, sesudah dana deposito berhasil didongkrak, maukah bank pemerintah itu memasarkannya? "Sulit memasarkan dana itu jika pagu pertambahan kredit kami masih dibatasi," kata seorang bankir pemerintah. Jika benar pagu pertambahan kredit tahun anggaran ini hanya akan mencapai 15% (tahun sebelumnya 40%), menurut bankir itu, akan banyak dana nganggur.

Untuk mencegah terjadinya likuiditas berlebihan itu, bankir pemerintah tadi mengimbau agar pemerintah mengizinkan bank di lingkungannya melakukan operasi di luar negeri. Misalnya turut dalam memberikan pinjaman sindikasi kepada negara lain, atau investasi, dianggapnya merupakan salah satu upaya pemasaran dana yang cukup menarik. "Pemerintah sebaiknya sedikit demi sedikit melepaskan kendalanya," kata seorang bankir lain. "Kita seyogyanya kini bersikap sedikit agresif kalau ingin besar, jangan konservatif melulu."

Imbauan bankir itu memang masuk akal. Setidaknya kalau pemerintah ingin meminyaki roda bisnis yang sekarang terasa makin lesu. Tapi agaknya itu tak akan terjadi dalam tahun anggaran sekarang. Sebab, seperti kata seorang pejabat ekonomi, seluruh perhatian pemerintah sekarang adalah: bagaimana untuk mengamankan neraca pembayaran, agar tidak menanggung beban defisit yang terlalu besar.

DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK PEMERINTAH
(dalam milyar rupiah)



Lampiran II

Mengapa Bunga Deposito Bank Swasta Lebih Tinggi

SURABAYA: Bank swasta dalam memberikan bunga deposito jauh lebih besar dibandingkan dengan bank pemerintah. Hal itu disebabkan bank pemerintah mendapatkan likuiditas dari Bank Indonesia, sedangkan bank swasta berdiri sendiri.

Dikemukakan, berapa pun dana yang diperlukan bank pemerintah, Bank Indonesia akan menunjangnya. Sebaliknya bagi bank swasta apabila memerlukan dana, ia harus berusaha sendiri. Tidak begitu mudah atau seandainya meminta pada Bank Indonesia.

Beda bunga deposito itu menyolok, swasta mencapai 18-20 persen, sedangkan bank pemerintah hanya 12 persen setahunnya. Bank Indonesia sendiri tidak memperkenankan bank swasta bersaing dalam memberikan tingkat bunga rendah, sebaliknya memperkenankan bersaing memberikan tingkat bunga yang tinggi.

Bank swasta yang menawarkan tingkat bunga tinggi akan lebih merangsang pemilik uang. Sebaliknya lagi bank pemerintah, deposito itu tidak begitu diperlukan, ujar seorang pengusaha bank swasta.

Seorang pimpinan bank pemerintah di Surabaya mengatakan, adanya pemilik uang yang menanamkan uangnya ke bank asing sebenarnya punya pamrih: dapat kredit besar.

Sebenarnya, menurut dia, hal itu bukan untuk "melarikan" uang dari bank pemerintah ke bank asing dengan dasar lain.

Bank swasta sekarang kelihatan "bersaing" dalam memberikan bunga besar. Ini disebabkan bank swasta sekarang juga memerlukan dana, yang hanya dapat diperoleh dari pemilik uang yang didepositokan di banknya.

"Persaingan" itu menurut beberapa pimpinan bank tidak berpengaruh jelek, karena hal itu merupakan "imbal jasa".

Diberikan contoh, misalnya sebuah bank swasta memberikan bunga yang tinggi, pihak bank dapat menyerap dana dari pemilik uang, sedangkan pemilik uang sendiri dapat bunga yang tinggi, pihak bank dapat menyerap dana dari pemilik uang, sedangkan pemilik uang sendiri dapat bunga yang tinggi. "Semakin banyak pemilik uang terangsang menandatangani uangnya pada bank, semakin banyak dana masyarakat terserap," kata seorang pimpinan bank.

Dari kalangan bank pemerintah memang diakui, bahwa pemberian kredit memang cukup ketat, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, termasuk pemberian kredit kecil (KIK, KMKP). Alasan yang dikemukakan, karena pengaruh moneter selama ini. (h)

Sumber : *Koran Surabaya Post*, Tahun XXXI No. 144, 4 Juni 1983



Ta-
DISERBU. Begitu ada
 kabar rupiah di devaluasi,
 maka toko emas menjadi
 sasaran pembeli dan
 penjual emas. Rabu sore
 kemarin, toko emas Sumber
 Jaya di Blauran Surabaya
 diserbu pembeli, sebab di-
 banding toko emas sederet-
 annya, toko ini menjual
 emas lebih murah.
 Di antara pembeli,
 seorang ibu tua terpaksa
 menguk diantara tangan
 pembeli.

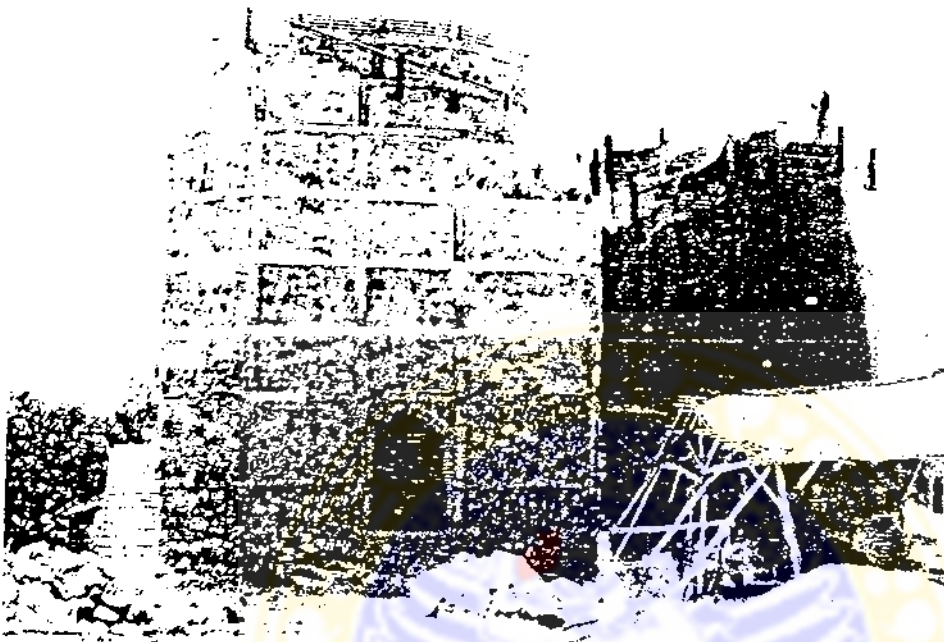
Gambar : 1. Suasana Toko emas yang diserbu pembeli setelah devaluasi

Sumber : *Koran Surabaya Post*, Tahun XXXI No. 75, 31 Maret 1983



Gambar 2. Suasana pengumuman devaluasi oleh Menteri ekuin di gedung Deppen

Sumber : *Majalah Tempo*, No. 6, Th. XIII, 9 April 1983



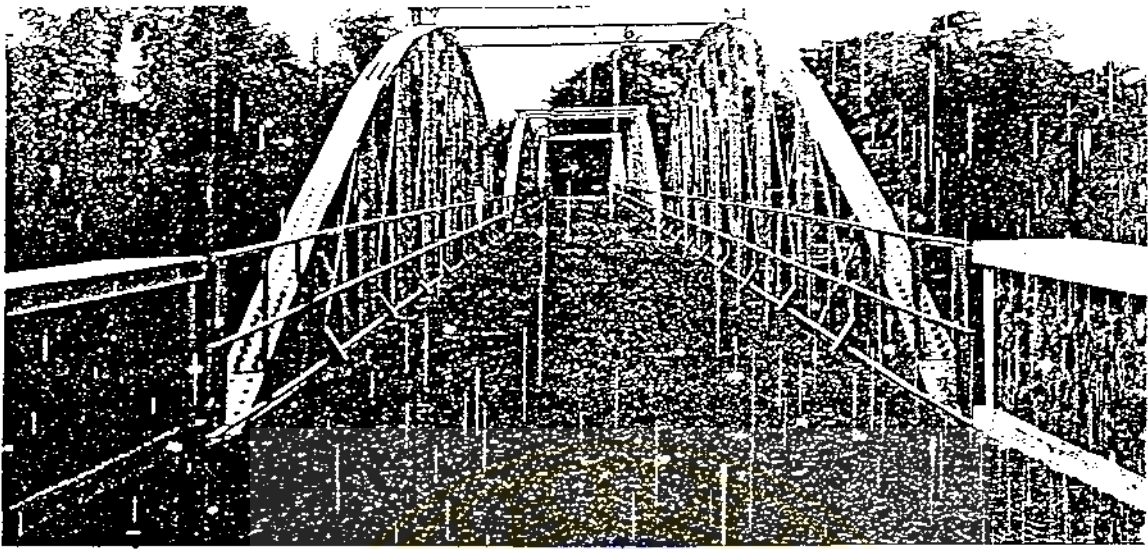
Limekiln bussiness Development was supported with a credit of Bank Pembangunan Daerah of East Java.



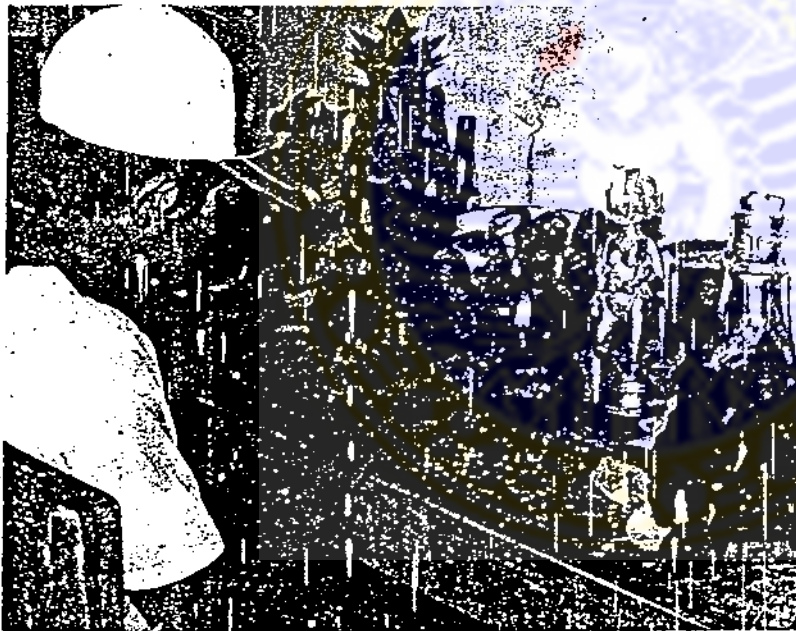
An employer of "Tegel" (floor tile) industry had been using the benefit of K.I.Ks' K.M.K.P, the credits given by B.P.D of East Java.

Gambar 3. Usaha pembuatan keramik hasil kredit BPD Jatim

Sumber : Arsip BPD Jatim, Surabaya, 1984



Dengan bantuan kredit dari B.P.D. Jawa Timur kepada kontraktor pelaksana proyek perunjangan jembatan Jati, Magetan dapat berjalan lancar.



Untuk melestarikan seni budaya bangsa dan meningkatkan usaha kerajinan kuningan di daerah Trowulan, Mojokerto, maka BPD. Jatim membantu pengusaha industri kecil dengan KIK/KMKP.

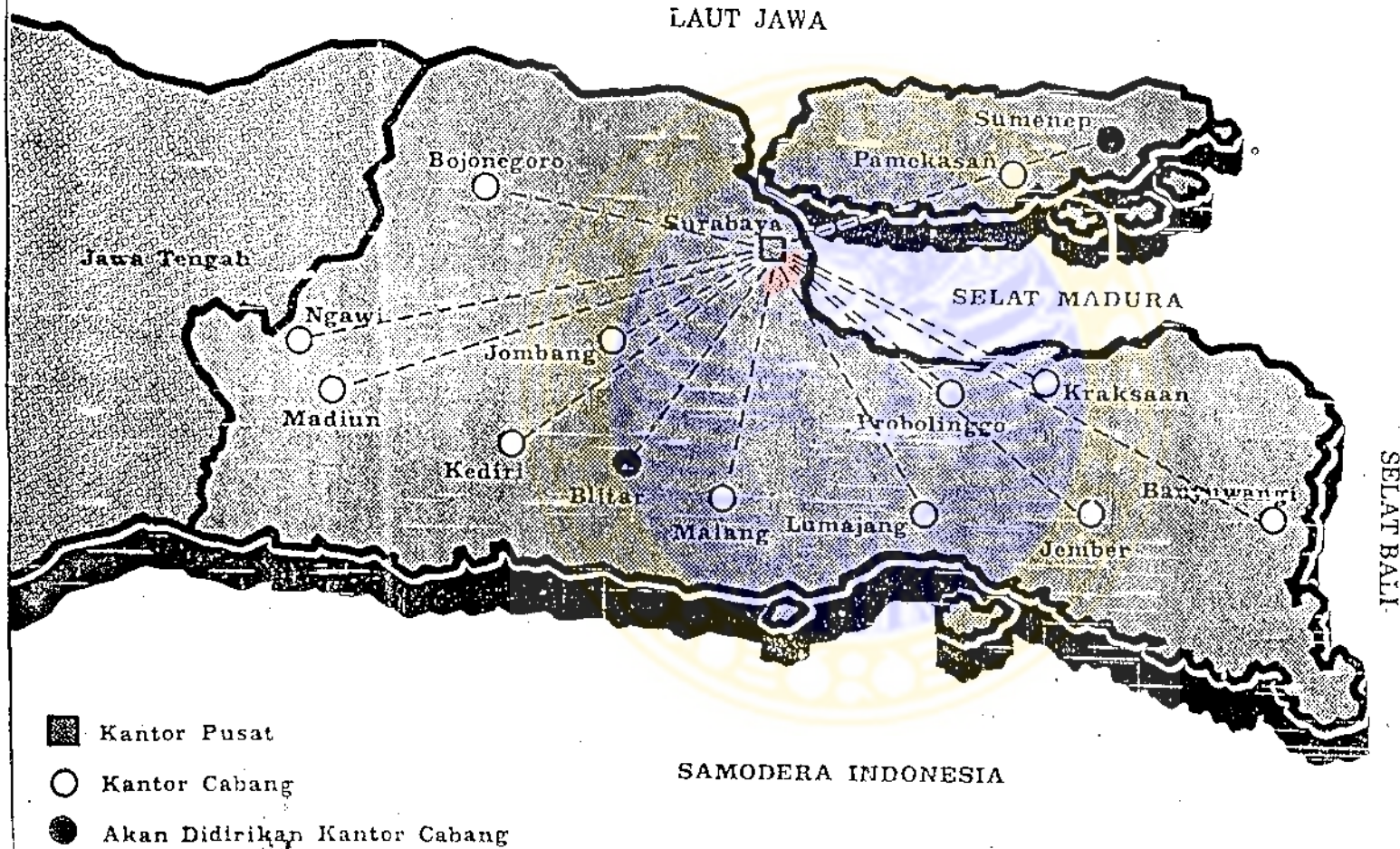
Usaha perbengkelan pengusaha pribumi golongan ekonomi lemah yang memperoleh bantuan kredit kelayakan dari BPD. Jatim.



Gambar 4. Bantuan Kredit BPD Jatim untuk pembangunan Jembatan di Magetan

JAWA-TIMUR

PROPINSI JAWA TIMUR



Gambar 5. Pensebaran Kantor BPD Jatim di Prop. Jatim

Sumber : Arsip BPD Jatim, Surabaya, 1983